

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
TERHADAP PDRB PER KAPITA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

ACC
Simp diujikan
18/25
16

SKRIPSI



Oleh :

NAMA : Yusuf Andra Winuriko
NIM ; 21313012
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN JUDUL

Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesehatan Terhadap PDRB Per Kapita di
Provinsi Jawa Tengah

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Yusuf Andra Winuriko
Nomor Mahasiswa : 21313012
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam Tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juni 2025

Penulis,



Yusuf Andra Winuriko.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Kesehatan Terhadap PDRB Per
Kapita Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Nama : Yusuf Andra Winuriko
Nomor Mahasiswa : 21313012
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 18 Juni 2025
telah disetujui dan disahkan oleh
dosen pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Prastowo', written in a cursive style.

Prastowo, S.E., M.Ec.Dev.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesehatan Terhadap PDRB Per Kapita di Provinsi Jawa Tengah

Disusun oleh : YUSUF ANDRA WINURIKO

Nomor Mahasiswa : 21313012

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 14 Juli 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prastowo, SE.,M.Ec.Dev.

Penguji : Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kami panjaskan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, serta kelimpahan nikmat yang begitu luar biasa, sehingga penulis diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta tidak lupa sholawat serta salam selalu dijunjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Perjuangan penulis selama ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah mendukung sepenuh hati kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Nurwidadi dan Ibu Siti Mardewi yang selalu mendukung penuh penulis melalui doa-doa yang tulus dan keteguhan hati yang tidak pernah lelah menjadi penyemangat.
2. Kedua kakak saya Vista Winuring Cintyawati dan Vidya Adenisa Winuringtyas yang sudah menjadi pedoman dan panutan dalam mengerjakan skripsi, serta dukungan uang jajan untuk penulis.
3. Teman-teman terdekat yang selalu menemani penulis dari awal penulisan sampai akhir penulisan, serta selalu mendukung penulis dalam keadaan apapun.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbilalamin

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya dan yang telah memberikan petunjuk dan kesabaran dalam mengerjakan skripsi. Tidak lupa kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Kesehatan Terhadap PDRB Per Kapita Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah” dengan lancar. Skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Pada penulisan skripsi ini terdapat berbagai halangan dan rintangan dari awal penulisan sampai akhir penulisan, namun akhirnya tetap dapat diselesaikan oleh penulis dengan dukungan banyak orang. Penulis dengan hati yang terdalam mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama masa penulisan skripsi:

1. Allah SWT Maha Pengasih serta Maha Penyayang yang telah memberikan kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dalam setiap langkahnya.
2. Kedua orang tua, Bapak Nurwidadi dan Ibu Siti Mardewi yang selalu mendukung penuh penulis melalui doa-doa yang tulus dan keteguhan hati yang tidak pernah lelah menjadi penyemangat.
3. Kedua kakak saya Vista Winuring Cintyawati dan Vidya Adenisa Winuringtyas yang sudah menjadi pedoman dan panutan dalam mengerjakan skripsi, serta dukungan uang jajan untuk penulis.
4. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D. Sebagai Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Abdul Hakim S.E., M.Ec., Ph.D. Sebagai Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Prasowo, S.E., M.Ec.Dev. Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah membantu, membimbing, dan meluangkan waktu dengan sepenuh hati

selama masa penulisan skripsi hingga terselesaikan. Penulis dengan tulus mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas semua jasa yang telah diberikan kepada penulis.

7. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika terimakasih atas ilmu dan pelajarannya selama proses kuliah.
8. Zahwa Aisyiah Salma yang telah membantu, mendukung, menemani dengan tulus selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa pada akhirnya, segala upaya dan hasil penelitian ini adalah bagian dari kehendak Allah SWT. Hasil penulisan skripsi ini masih terdapat banyak keterbatasan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menerima dengan lapang dada segala kritikan dan masukan untuk kebermanfaatan skripsi ini. Penulis berharap melalui skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat yang luas.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 18 Juni 2025



Yusuf Andra Winuriko

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Kajian Pustaka.....	10
2.2 Kajian Teori	13
2.2.1 <i>Human Capital</i>	13
2.3 Hubungan Antar Variabel	16
2.3.1 Rata-rata Lama Sekolah Dengan PDRB Per kapita	16
2.3.2 Angka Harapan Hidup Dengan PDRB Per kapita	16
2.3.3 Upah Minimum Kabupaten/Kota Dengan PDRB Per kapita	17
2.3.4 Pengeluaran Pemerintah Dengan PDRB Per kapita	17
2.4 Kerangka Pemikiran	18
2.5 Hipotesis Penelitian.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Jenis Penelitian dan Cara Pengumpulan Data	19
3.2 Definisi Variabel	19
3.3 Metode Analisis.....	21
3.3.1 Model Regresi Data Panel	21

3.3.2 Pendekatan Dalam Metode Data Panel.....	22
3.3.3 Penentuan Model Regresi Data Panel.....	23
3.3.4 Uji Hipotesis	24
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Deskripsi Data	27
4.2 Analisis Deskriptif.....	27
4.3 Hasil Regresi Data Panel	28
4.3.1 Uji Chow.....	28
4.3.2 Uji Hausman	28
4.4 Uji Hipotesis	29
4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	29
4.4.2 Uji F Statistic (F-test)	29
4.4.3 Uji t.....	30
4.5 Pembahasan Hasil	30
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	33
5.1 Kesimpulan.....	33
5.2 Implikasi	33
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	38

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Variabel Operasional	19
Tabel 4.2 Analisis Deskriptif	27
Tabel 4.3 Uji Chow	28
Tabel 4.4 Uji Hausman.....	28
Tabel 4.5 Hasil Estimasi Fixed Effect.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 PDRB Per kapita ADHK Provinsi Jawa Tengah 2004-2023	2
Gambar 1.2 Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah 2004-2023.....	3
Gambar 2.1 Kurva Pendapatan dan Usia	14
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Data Penelitian.....	38
Lampiran II Hasil Uji Chow	60
Lampiran III Hasil Uji Hausman.....	61
Lampiran IV Hasil Uji Random Effect Model	61
Lampiran V Hasil Uji Common Effect Model	62
Lampiran VI Hasil Uji Fixed Effect Model.....	62

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh dari tingkat pendidikan dan kesehatan terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah periode 2004 sampai 2023. Data yang digunakan adalah data sekunder dan metode yang digunakan adalah Analisis Regresi data panel menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil yang didapatkan dari penelitian ini angka harapan hidup, UMK, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sebaliknya, rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap PDRB per kapita pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam meningkatkan PDRB per kapita adalah dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Kebijakan lain terkait kesehatan dalam meningkatkan PDRB per kapita adalah dengan perluasan layanan kesehatan dasar dan peningkatan fasilitas kesehatan. Tingkat pendidikan dan kesehatan meningkat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: PDRB Per Kapita, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, UMK, Pengeluaran Pemerintah

BAB I PENDAHULUAN

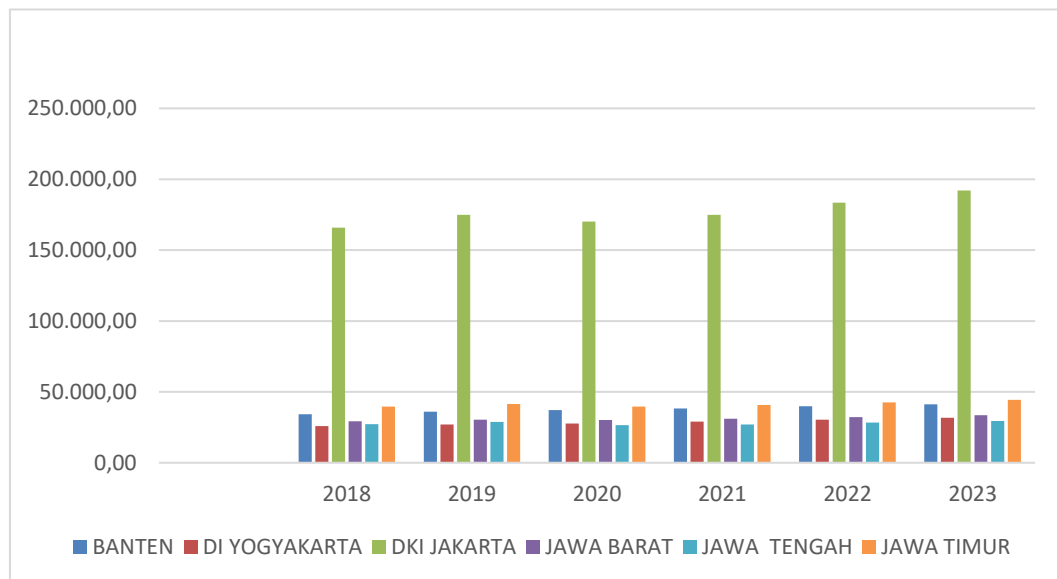
1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu cara untuk melihat hasil pembangunan yang telah dijalankan dan juga berguna untuk memutuskan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang positif menandakan adanya peningkatan perekonomian, sementara pertumbuhan ekonomi negatif menandakan adanya penurunan dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menjadi target negara agar dapat meningkatkan pembangunan nasional yang dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia yang dijalankan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional (Zahari, 2017). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa jauh kegiatan perekonomian dapat menciptakan tambahan penghasilan masyarakat pada suatu periode tertentu (Humairah, 2023).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu cara untuk mengukur dan melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan kemampuan ekonomi masyarakatnya. PDRB yang lebih tinggi umumnya menggambarkan potensi ekonomi yang lebih luas, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, dengan meningkatnya PDRB belum tentu efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan jika tidak diiringi dengan kebijakan distribusi yang adil (Lilya & Dewi, 2012). Nilai PDRB akan menggambarkan kemampuan dari suatu daerah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang tersedia di daerah tersebut (Aprianda, 2018).

Salah satu cara untuk mengukur standar hidup di setiap daerah adalah dengan menggunakan pendapatan per kapita/PDRB per kapita. Tinggi rendahnya nilai PDRB per kapita yang dimiliki oleh suatu daerah disebabkan adanya faktor pendukung produktivitas yang dimiliki setiap daerah untuk menghasilkan barang dan jasa, yaitu SDA, SDM, dan teknologi. Standar hidup adalah kemampuan ekonomi dalam menciptakan sebuah barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi nilai hasil produksi yang dihasilkan, maka semakin tinggi standar hidup di daerah tersebut. Beberapa faktor yang

mendorong produktivitas yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Dalam prakteknya, standar hidup adalah nilai PDRB per kapita (Aprianda, 2018). Semakin tinggi PDRB per kapita di suatu daerah semakin tinggi pendapatan masyarakat daerah tersebut.

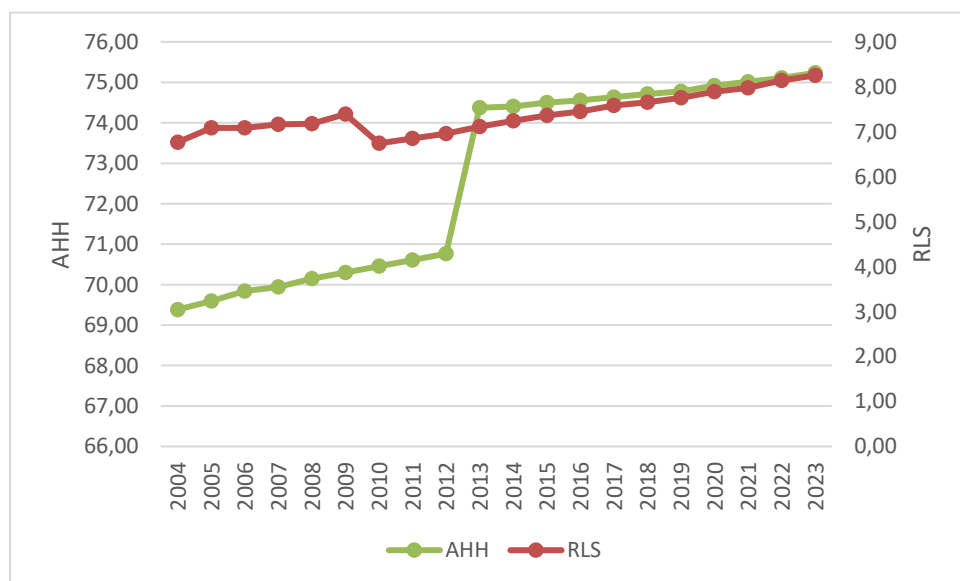


Gambar 1.1 PDRB Per kapita ADHK Provinsi Jawa Tengah 2004-2023

Sumber : data diolah dari BPS 2004-2023

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa nilai PDRB per kapita provinsi di Jawa tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah secara konsisten memperoleh PDRB per kapita paling rendah dibanding 5 provinsi lainnya. PDRB per kapita Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, tetapi masih tertinggal dengan 5 provinsi lainnya di Jawa. Pada tahun 2023, PDRB per kapita Jawa Tengah sebesar 29.367,22 ribu rupiah, lebih rendah dibandingkan DI Yogyakarta sebesar 31.747,96 ribu rupiah, kedua terendah setelah Jawa Tengah. PDRB per kapita tertinggi pada tahun 2023 di tempati Provinsi DKI Jakarta sebesar 192.133,97 ribu rupiah jauh diatas provinsi lainnya. Dalam kurun waktu enam tahun, pertumbuhan PDRB per kapita Jawa Tengah termasuk paling kecil dibanding provinsi lainnya, dengan peningkatan hanya sebesar 7,6%. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti pendidikan, kesehatan, upah minimum, belanja pemerintah, dan lain sebagainya.

Rata-rata lama sekolah adalah indikator tingkat pendidikan di suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu gambaran modal manusia (*human capital*) yang menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Bahwa orang yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi, memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat kehidupannya. Besarnya penghasilan seseorang dipengaruhi oleh lamanya seseorang menempuh pendidikan. Rata-rata lama sekolah menunjukkan semakin tinggi pendidikan yang di peroleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah memiliki arti semakin tinggi tingkat pendidikan yang di ditempuh. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang di tempuh seseorang, maka semakin tinggi juga kualitas seseorang, baik dari segi pola pikir maupun tindakannya (Hepi & Zakiah, 2018).



Gambar 1.2 Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah 2004-2023

Sumber : data diolah dari BPS 2004-2023

Gambar 1.2 rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah periode tahun 2004-2023 menunjukkan tren positif. Pada tahun 2004 rata-rata lama sekolah sebesar 6,77 tahun menjadi 8,25 tahun pada 2023, dengan kenaikan 1,48 tahun dalam kurun waktu 19 tahun. Terdapat penurunan pada tahun 2010 dengan rata-rata lama sekolah sebesar 6,74 tahun setelah sebelumnya pada tahun 2009 sebesar 7,29. Setelah tahun 2010, rata-

rata lama sekolah kembali meningkat secara bertahap, dengan pertumbuhan stabil pada 2018-2023. Kenaikan rata-rata lama sekolah ini menunjukkan adanya kemajuan dalam bidang pendidikan di Jawa Tengah. Walaupun rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah menunjukkan tren positif pada setiap tahunnya, angkanya tetap pada kisaran 7 sampai 8 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum, penduduk Jawa Tengah belum menyelesaikan program wajib belajar selama 12 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam bidang pendidikan. Rata-rata lama sekolah yang masih rendah secara umum, menggambarkan masyarakat Jawa Tengah hanya mampu menyelesaikan tingkat pendidikan SMP/ sederajat, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Jawa Tengah masih tergolong belum memiliki kemampuan yang luas dalam bidang akademik dikarenakan hanya menyelesaikan pendidikan formal sampai SMP/ sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bidang pendidikan masih menghambat pertumbuhan PDRB per kapita di Jawa Tengah.

Tingkat kesehatan juga memiliki hubungan yang erat dengan PDRB per kapita karena dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, biaya kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia. Negara atau daerah yang memiliki biaya kesehatan terkendali dan pelayanan kesehatan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran, membuat lebih banyak sumber daya dapat dialokasikan untuk sektor-sektor ekonomi yang lain, sedangkan beban biaya kesehatan yang tinggi dapat menyebabkan dampak negatif pada PDRB per kapita karena menghambat sumber daya yang dapat digunakan untuk investasi dan pengembangan ekonomi (Tarigan, 2020).

Gambar 1.2 angka harapan hidup di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2004-2023, menunjukkan tren positif. Pada tahun 2004 Jawa Tengah memiliki angka harapan hidup sebesar 69,38 dan meningkat sampai pada tahun 2023 sebesar 75,23, dengan kenaikan sebesar 5,85 tahun dalam kurun waktu 19 tahun. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2013, di mana angka harapan hidup meningkat drastis dari 70,77 tahun 2010 menjadi 74,37 pada tahun 2013. Meningkatnya angka harapan hidup ini menunjukkan perbaikan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan. Angka harapan hidup yang semakin tinggi menggambarkan peningkatan sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif. Masyarakat yang memiliki usia hidup lebih panjang dapat meningkatkan kontribusi ekonomi lebih besar dalam jangka waktu

panjang.

Salah satu cara dalam mengukur kesejahteraan penduduk yaitu melalui upah minimum. Rendahnya upah minimum menggambarkan bahwa penduduk di daerah tersebut memiliki kualitas hidup dan tingkat konsumsi yang rendah, sebaliknya upah minimum yang tinggi menggambarkan bahwa penduduk di daerah tersebut memiliki standar hidup dan tingkat konsumsi yang tinggi (Saskia et al., 2022). Menurut (Sumarsono, 2003), ketika tingkat upah di suatu daerah meningkat, mengakibatkan tingkat konsumsi penduduk ikut naik semakin meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan PDRB per kapita ikut meningkat.

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, merupakan tindakan pemerintah untuk mengatur kegiatan perekonomian dengan cara menetapkan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya, yang di tulis dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini merupakan cara untuk menstabilkan harga, tingkat output, kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Wijaya, 2019). Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Romadhon, 2024). Oleh karena itu penting untuk mengelola pengeluaran pemerintah dengan baik agar tercapainya pertumbuhan ekonomi. Dengan salah satu caranya memperhatikan PDRB per kapita agar kesejahteraan masyarakat tercapai.

Pemilihan periode 2004 sampai 2023 dilakukan karena mencakup masa penting dalam sejarah perekonomian Indonesia. Selama masa ini, terdapat banyak peristiwa besar seperti krisis keuangan global 2008 dan COVID-19 yang memiliki dampak besar pada ekonomi daerah. Pengambilan data dalam jangka waktu yang panjang bertujuan untuk menggambarkan lebih jelas terkait permasalahan yang di angkat. Jawa Tengah menjadi daerah yang diangkat dalam penelitian ini dikarenakan PDRB per kapita Jawa Tengah menjadi salah satu yang terendah di seluruh Provinsi di Jawa. Oleh karena itu, penelitian ini sangat tepat dilakukan di Jawa Tengah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, UMK, dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB per kapita pada tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait PDRB per kapita yang rendah di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan di daerah yang berbasis data. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi rujukan bagi studi-studi berikutnya di bidang pertumbuhan ekonomi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2023?
2. Seberapa besar angka harapan hidup berpengaruh terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2023?
3. Seberapa besar UMK berpengaruh terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2023?
4. Seberapa besar pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah didapat maka tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai yakni :

1. Untuk menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2023?
2. Untuk menganalisis pengaruh angka harapan hidup terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2023?
3. Untuk menganalisis pengaruh UMK terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2023?
4. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2023?

kapita di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2023?

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat :

1. Bagi Penulis

penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang peranan rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, UMK, dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB per kapita. Penelitian ini juga sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana (S1) kepada penulis.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi khususnya bagi penelitian yang memiliki tema mengenai pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, UMK, dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB per kapita, khususnya untuk mahasiswa Ekonomi Pembangunan.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan menjadi referensi dasar bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan, penelitian ini dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi.

1.5. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai awal dari suatu penelitian untuk menggambarkan latar dari permasalahan yang sedang dibahas, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, kegunaan/nilai dari penelitian, dan struktur yang akan digambarkan dalam penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai kajian pustakan, landasan teori, kerangka pemikiran pada penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis dan pengumpulan data, variabel-variabel data, dan metode analisis data

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian, dimana hasil tersebut akan dianalisis dan diulas kembali dalam bentuk pembahasan. Bahan data yang telah didapatkan akan diulas dan dianalisis menggunakan alat yang disiapkan dan membawa ke tujuan penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi kesimpulan hasil analisis dan pengujian pada penelitian, serta saran dan implikasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian-penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya, dimana penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bisa menjadi acuan bagi penulisan skripsi ini. Kajian Pustaka dari penelitian sebelumnya bertujuan sebagai landasan dan acuan untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu menjadi referensi dalam menetapkan variabel-variabel penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penelitian ini :

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sitorus et al., 2024) bertujuan untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan penduduk Indonesia terhadap tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan di Indonesia dalam periode 2010-2022. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan model *random effect*. Didapatkan hasil dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita. Sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh (Hepi & Zakiah, 2018) bertujuan untuk melihat pengaruh angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah terhadap PDRB per kapita serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (*Path Analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan angka harapan hidup berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB per kapita di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hasbi et al., 2019) bertujuan untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten Luwu Timur. Sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh (Winarni et al., 2023) bertujuan untuk melihat pengaruh upah minimum, pendapatan asli daerah, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi terhadap PDRB perkapita di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini diketahui

bahwa upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jambi. Sejalan juga dengan penelitian lain yang dilakukan oleh (Saskia et al., 2022) bertujuan untuk melihat pengaruh tenaga kerja, UMP, dan PAD terhadap PDRB per kapita di Wilayah Sumatera. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini diketahui UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita di Wilayah Sumatera.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Kusuma Nigrum, 2023) bertujuan untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan dan belanja bidang kesehatan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel bersifat GLS. Hasil penelitian ini diketahui bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Provinsi Sumatera Selatan. Sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh (Affandi et al., 2019) bertujuan untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan dan TPAK terhadap PDRB perkapita di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini diketahui bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap PDRB perkapita di Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fahrudin & Aji, 2021) bertujuan untuk menunjukkan pengaruh remitensi, pengeluaran pemerintah, dan FDI terhadap PDB perkapita di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis OLS (*Ordinart Least Square*). Hasil penelitian ini diketetahui bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB perkapita di Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fahlewi et al., 2020) bertujuan untuk menunjukkan pengaruh tingkat pendidikan, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel. Hasil penelitian ini diketahui bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap PDRB, sedangkan tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya oleh (Sitorus et al., 2024) tentang Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Kesehatan terhadap PDRB Per kapita di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu meliputi penggunaan variabel independen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Hidup (AHH), begitu juga dengan variabel

dependen PDRB per kapita, persamaan lain ada pada metode analisis yang sama menggunakan regresi data panel. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu meliputi perbedaan cakupan waktu. Penelitian terdahulu menggunakan data periode tahun 2010-2022, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun periode 2004-2023. Penelitian terdahulu menggunakan lingkup 33 provinsi di Indonesia sedangkan penelitian ini menggunakan lingkup 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya oleh (Winarni et al., 2023) tentang Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap PDRB Per kapita Provinsi Jambi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu meliputi penggunaan variabel independen Upah Minimum, begitu juga dengan variabel dependen PDRB per kapita. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu meliputi perbedaan cakupan waktu. Penelitian terdahulu menggunakan data periode tahun 2010-2022, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun periode 2004-2023. Perbedaan lainnya ada pada penelitian terdahulu menggunakan metode analisis regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Penelitian terdahulu menggunakan lingkup di Provinsi Jambi, sedangkan penelitian ini menggunakan lingkup di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya oleh (Fahrudin & Aji, 2021) tentang Pengaruh Remitensi, Pengeluaran Pemerintah, dan FDI terhadap PDB Perkapita Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen Pengeluaran Pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu meliputi perbedaan cakupan waktu. Penelitian terdahulu menggunakan data tahun periode 1985-2019, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun periode 2004-2023. Perbedaan lain ada pada penelitian terdahulu menggunakan metode analisis OLS (*Ordinary Least Square*), sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Penelitian terdahulu menggunakan lingkup di Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan lingkup di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

2.2 Kajian Teori

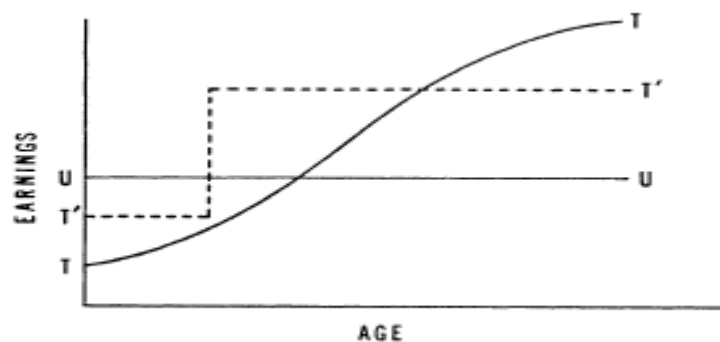
2.2.1 *Human Capital*

Gagasan *human capital* pertama kali muncul pertama kali pada tahun 1770-an dibawakan oleh Adam Smith. Gagasan ini selanjutnya di kembangkan oleh Theodore Schultz pada tahun 1961 dan Gary Becker pada tahun 1962. Menurut Schultz (1961) menjelaskan bahwa manusia diposisikan tidak hanya sebagai tenaga kerja dalam arti konvensional, tetapi sebagai bentuk modal yang dapat ditingkatkan nilainya melalui berbagai investasi. Investasi terhadap manusia tersebut melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, dan mobilitas tenaga kerja, investasi tersebut yang nantinya akan menjadi peningkatan pendapatan bagi modal manusia. Schultz (1961) menyebutkan bahwa pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan bukanlah konsumsi murni, melainkan bentuk dari investasi yang menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang.

Menurut Schultz (1961) menjelaskan bahwa meningkatnya output ekonomi tidak sebanding dengan peningkatan jumlah input tenaga kerja atau modal fisik saja, melainkan memerlukan faktor lain dalam meningkatkan efisiensi melalui pengembangan kemampuan dan keterampilan manusia. Investasi dalam bidang pendidikan membuat manusia untuk memahami, mengadopsi, dan menciptakan suatu inovasi baru. Sementara itu, investasi dalam bidang kesehatan dapat meningkatkan kapasitas kerja dan mampu menahan tekanan, sehingga akhirnya berdampak langsung terhadap produktifitas tenaga kerja.

Pengembangan teori ini dilanjutkan oleh Becker (1962) yang merumuskan bagaimana investasi dalam bentuk pelatihan kerja, pendidikan, dan kesehatan fisik dan emosional dan fisik berdampak pada pendapatan individu. Sebagian besar investasi pada modal manusia meningkatkan pendapatan yang dirasakan pada usia yang lebih tua, karena pengembalian ditambahkah pada pendapatan saat itu, dan diturunkan pada usia yang lebih muda, karena biaya dikurangi dari pendapatan yang diterima saat itu. Efek umum ini tercipta oleh jenis modal manusia yang sangat berbeda, sebuah dasar yang tercipta untuk teori yang terpadu dan terkuat. Analisis dimulai dalam pembahasan tentang jenis modal manusia tertentu, dengan fokus terbesar diberikan pada pelatihan di tempat kerja karena dengan jelas menggambarkan dan menekankan efek umum, ke teori umum yang berlaku dalam

jenis apapun. Teori umum memiliki berbagai macam implikasi penting, seperti perbedaan pendapatan antar individu dan antar daerah, hingga perbedaan pendapatan berdasarkan usia. Sebagai contoh, karena penghasilan merupakan hasil kotor dari modal manusia, beberapa orang berpotensi mendapatkan lebih dari yang lain dikarenakan mereka berinvestasi lebih banyak dari yang lain. Dan karena orang-orang yang “mampu” berminat berinvestasi lebih banyak dari yang lain, distribusi pendapatan dapat sangat tidak merata bahkan miring, sementara “kemampuan” didistribusikan secara simetris dan tidak terlalu merata.



Sumber: Becker, 1962

Gambar 2.1 Kurva Pendapatan dan Usia

Menurut Becker (1962) investasi dalam modal manusia, seperti pendidikan dan pelatihan, memiliki pengaruh terhadap pendapatan individu semasa hidup. Pekerja tanpa pelatihan memiliki pendapatan yang tetap, dengan asumsi tidak ada investasi dalam modal manusia. Digambarkan dengan garis horizontal UU (*Untrained Person*). Pekerja terlatih menerima pendapatan lebih rendah selama masa pelatihan karena mengeluarkan biaya investasi modal manusia. Setelah pelatihannya berakhir, pendapatannya akan meningkat lebih tinggi dibandingkan UU karena mendapatkan manfaat dari investasi modal manusia tersebut. Membentuk kurva TT (*Trained Person*) yang lebih curam dan cekung. Perbedaan akan semakin besar apabila biaya dan manfaat pelatihan semakin besar. Dalam kasus ekstrem di mana pelatihan hanya meningkatkan tingkat produktivitas marjinal tanpa kemiringan kurva, pendapatan akan naik tajam setelah masa pelatihan dan kemudian mendatar, digambarkan dengan kurva (T'T'). Hasilnya membuat kurva cekung dengan kenaikan pendapatan

yang signifikan di akhir masa pelatihan dan tidak ada perubahan setelahnya.

Teori *human capital* merupakan suatu pemikiran yang menganggap manusia adalah salah satu bentuk kapital atau barang modal seperti barang modal lainnya. Menurut Todaro & Smith (2015; 365-366) menerangkan bahwa konsep dari *human capital* dapat digambarkan melalui seseorang yang melakukan investasi yang memiliki tujuan untuk mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi untuk masa yang akan datang. Dalam menggambarkan *human capital* dibutuhkan investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini diterangkan bahwa ketika tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi, maka dapat menggambarkan bahwa seseorang memiliki keterampilan dan kemampuan lebih tinggi. Sementara itu, tingkat kesehatan memiliki hubungan kuat dengan tingkat pendidikan. Apabila seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tanpa diiringi kesehatan yang baik, maka tidak akan meningkatkan produktivitas. Sedangkan, apabila seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan diiringi dengan kesehatan yang baik, maka akan meningkatkan produktivitas sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam mengukur tingkat kesehatan dalam suatu daerah dapat dilakukan dengan menggunakan nilai angka harapan hidup. Hal tersebut adalah dampak dari pembangunan bidang kesehatan (Laksono, 2013). Semakin tinggi angka harapan hidup seseorang dalam suatu daerah menggambarkan semakin tinggi kualitas kesehatannya. Angka harapan hidup di suatu daerah menggambarkan layanan kesehatan dan pembangunan dalam bidang kesehatan lainnya tinggi, maka dapat mendorong produktivitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Dalam mengukur tingkat pendidikan menggunakan rata-rata lama sekolah. Pendidikan merupakan salah satu gambaran modal manusia (*human capital*) yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia (Hepi & Zakiah, 2018). Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam menempuh semua tingkat pendidikan yang pernah ditempuh (BPS, 2023).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori *human capital* menegaskan terhadap produktivitas dari investasi modal manusia agar meningkatkan produktivitas sehingga pendapatan per kapita dan perekonomian masyarakat bisa lebih baik lagi.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Rata-rata Lama Sekolah Dengan PDRB Per kapita

Rata-rata lama sekolah menggambarkan semakin tinggi pendidikan formal yang ditempuh oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah diartikan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh. Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang ada. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin besar produktivitas orang di suatu daerah dapat meningkatkan pendapatan individu maupun nasional. Meningkatnya pendapatan individu dapat meningkatkan konsumsi, sehingga meningkatkan PDRB per kapita di daerah tersebut (Hepi & Zakiah, 2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sitorus et al., 2024) menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita di Indonesia. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Kusuma Nigrum, 2023) menunjukkan juga bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita di Provinsi Sumatera Selatan.

2.3.2 Angka Harapan Hidup Dengan PDRB Per kapita

Angka harapan hidup merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat ditempuh seseorang. Angka harapan hidup menjadi indikator penting untuk menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Hal tersebut adalah dampak dari pembangunan bidang kesehatan (Laksono, 2013). Tingkat kesehatan bukan hanya menggambarkan adanya penyakit atau tidak tetapi menggambarkan layanan kesehatan, promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan (Yuningsih, 2019). Dengan tingginya tingkat kesehatan masyarakat di suatu daerah, maka dapat menggambarkan bahwa kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut tinggi, sehingga dapat mendorong pendapatan per kapita masyarakatnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sitorus et al., 2024) menunjukkan bahwa angka harapan hidup berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita di Indonesia. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Hepi & Zakiah, 2018) juga menunjukkan bahwa angka harapan hidup berpengaruh terhadap PDRB per

kapita di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.3.3 Upah Minimum Kabupaten/Kota Dengan PDRB Per kapita

Salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan penduduk adalah melalui upah minimum. Tingginya upah minimum menggambarkan bahwa penduduk di daerah tersebut memiliki standar hidup dan tingkat konsumsi yang tinggi, sedangkan rendahnya upah minimum menggambarkan bahwa penduduk di daerah tersebut memiliki standar hidup dan tingkat konsumsi yang rendah (Saskia et al., 2022). Upah minimum menjadi salah satu cara dalam menentukan pendapatan per kapita. Dengan melihat upah minimum dapat mengetahui tingkat standar hidup dan tingkat konsumsi di suatu daerah. Hal tersebut menjadi indikator untuk melihat pendapatan per kapita yang menjadi salah satu tolak ukur dalam melihat keberhasilan pembangunan di daerah tersebut (Hasbi et al., 2019).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Winarni et al., 2023) menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jambi. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Hasbi et al., 2019) juga menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten Lawu Timur.

2.3.4 Pengeluaran Pemerintah Dengan PDRB Per kapita

Pengeluaran pemerintah merupakan tindakan pemerintah untuk mengatur kegiatan perekonomian. Tujuan dari pengeluaran pemerintah adalah menstabilkan harga, tingkat output, kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Wijaya, 2019). Hukum wagner menerangkan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat terhadap PDB, Wegner menerangkan bahwa meningkatnya pendapatan per kapita berhubungan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah (Mangkoesebroto, 2014). Hal tersebut menguatkan bahwa dengan pengeluaran pemerintah yang efektif dapat meningkatkan pendapatan per kapita di suatu daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fahrudin & Aji, 2021) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDB per kapita di Indonesia. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Syuhada et al., 2023) menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa; belanja modal berpengaruh positif

dan signifikan terhadap PDRB per kapita, sedangkan belanja pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB per kapita.

2.4 Kerangka Pemikiran

Didapatkan kerangka pemikiran untuk penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Didapatkan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2004-2023.
2. Diduga angka harapan hidup berpengaruh terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2004-2023.
3. Diduga upah UMK berpengaruh terhadap PDRB per di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2004-2023.
4. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2004-2023.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode analisis data panel merupakan perpaduan dari data *time series* tahun 2004-2023 dan data *cross section* dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.1
Variabel Operasional

Variabel	Satuan	Sumber
PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	BPS
RLS	Tahun	BPS
AHH	Tahun	BPS
UMK	Juta Rupiah	BPS
PP	Miliar Rupiah	DJPK

3.2 Definisi Variabel

Indikator yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti lebih lanjut disebut variabel. Variabel merupakan komponen utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi variabel independen (bebas). Variabel di definisikan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita (Y)

PDRB per kapita merupakan alat untuk menggambarkan bagaimana kemaksmuran dan tingkat kesejahteraan terjadi di suatu negara. PDRB perkpaita dapat dihitung dari membagi pendapatan nasional/wilayah tersebut dengan jumlah penduduknya (Hartini, 2015). Semakin tinggi PDRB per kapita semakin tinggi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pada penelitian ini, menggunakan data PDRB per kapita (dalam juta rupiah) 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun

2004-2023. Bersumber dari BPS Jawa Tengah.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{PDRB tahun } t}{\text{Jumlah Penduduk Tahun } t}$$

Keterangan:

PDRB tahun t = PDRB per kapita tahun tersebut

Jumlah Penduduk Tahun t = Jumlah Penduduk di tahun tersebut

2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam menempuh semua tingkat pendidikan yang pernah ditempuh. Rata-rata lama sekolah menunjukkan tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat pada daerah tertentu (BPS, 2023). Semakin tinggi rata-rata lama sekolah menggambarkan semakin tinggi kualitas masyarakat pada daerah tersebut, sehingga pendapatan per kapita di wilayah tersebut tinggi. Pada penelitian ini, menggunakan data rata-rata lama sekolah (dalam tahun) 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2004-2023. Bersumber dari BPS Jawa Tengah.

3. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat atau seseorang dalam daerah tertentu. Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun yang diharapkan seseorang akan hidup dalam suatu populasi atau wilayah tertentu (Endarti, 2015). Tingkat kesehatan bukan hanya menggambarkan adanya penyakit atau tidak tetapi menggambarkan layanan kesehatan, promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan (Yuningsih, 2019). Meningkatnya kualitas hidup seseorang melalui bidang kesehatan dapat menunjukkan bahwa meningkatnya daya kerja dan meningkatkan penghasilan, alhasil mampu meningkatkan besarnya pendapatan per kapita di daerah tersebut. Pada penelitian ini menggunakan data angka harapan hidup (dalam tahun) 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2004-2023. Bersumber dari BPS Jawa Tengah.

4. Upah Minimum Kabupaten/Kota(UMK)

Upah minimum adalah standar minimum yang harus di terapkan oleh seluruh pengusaha dan pelaku industri dalam memberikan upah di daerah tersebut (Shintia & Abbas, 2019). Upah minimum memiliki fungsi sebagai cara efisien untuk mengalokasikan kerja manusia, menggunakan sumber daya manusia secara tepat, agar terjadinya stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Hasbi et al., 2019). Pada penelitian ini menggunakan data upah minimal (dalam jutaan rupiah) 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2004-2023. Bersumber dari BPS Jawa Tengah.

5. Pengeluaran Pemerintah (PP)

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, merupakan tindakan pemerintah untuk mengatur kegiatan perekonomian dengan cara menetapkan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya. Tujuan dari kebijakan fiskal ini merupakan cara untuk menstabilkan harga, tingkat output, kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Wijaya, 2019). Dengan pengeluaran pemerintah akan menentukan arah kebijakan ekonomi yang akan mendorong pendapatan per kapita. Pada penelitian ini menggunakan data pengeluaran pemerintah (dalam miliar rupiah) 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2004-2023. Bersumber dari DJPK.

3.3 Metode Analisis

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Data panel adalah gabungan dari data *time series* dan data *cross section*. Pada penelitian ini, data panel yang digunakan berasal dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Alat analisis pengolahan data penelitian ini menggunakan Eviews 12.

3.3.1 Model Regresi Data Panel

$$\text{LOG PDRB Per kapita} = \beta_0 + \beta_1 \text{LOGRLS}_{it} + \beta_2 \text{LOGAHH}_{it} + \beta_3 \text{LOGUMK}_{it} + \beta_4 \text{LOGPP}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} : PDRB Per kapita

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

AHH : Angka Harapan Hidup

UMK : Upah Minimum Kabupaten/Kota

PP : Pengeluaran Pemerintah

i : Jumlah Observasi (35 Kabupaten/Kota)

t : Banyak waktu (Periode 2004-2023)

3.3.2 Pendekatan Dalam Metode Data Panel

Metode regresi data panel terdapat tiga pendekatan yang harus diaplikasikan terdahulu yaitu:

1. Model Common Effect

Metode *Common Effect* adalah pendekatan paling sederhana dalam analisis data panel untuk mengestimasi data panel. Metode ini merupakan penggabungan data *time series* dan *cross section*. Metode ini menggabungkan data tanpa memperhatikan perbedaan antara waktu dan individu, melihat perilaku data dengan objek sama dalam kurun waktu yang beragam (Widarjono, 2018).

2. Model Fixed Effect

Metode *fixed effect* adalah pendekatan dalam analisis data panel yang memakai variabel dummy dalam menggambarkan perbedaan dalam intersep. Model ini juga memperkirakan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar objek dan antar waktu. Terdapatnya variabel dummy pada model *fixed effect* menjadikan derajat kebebasan berkurang membuat berkurangnya efisiensi parameter (Widarjono, 2018).

3. Model Random Effect

Metode *random effect* terdapat variabel gangguan yang bertujuan untuk mengatasi berkurangnya derajat kebebasan akibat adanya variabel dummy. Pada model ini, variabel gangguan dapat

mencakup seluruh gangguan (penggabungan antara *time series* dan *cross section*) (Widarjono, 2018).

3.3.3 Penentuan Model Regresi Data Panel

Ketika akan melakukan uji regresi data panel, terdapat beberapa uji yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk menemukan model terbaik yang akan digunakan dalam regresi data panel. Terdapat beberapa uji berikut:

1. Uji Chow

Dilakukan untuk membandingkan dan memilih model yang terbaik antara model *common effect* dengan model *fixed effect*. Sebelum melakukan uji ini terdapat hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Model *Common Effect* terbaik

H_a = Model *Fixed Effect* terbaik

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan nilai probabilitas dari hasil estimasi, apabila nilai probabilitas di lebih kecil dari 0,05 (5%) maka menolak H_0 , diartikan bahwa model *fixed effect* merupakan yang terbaik. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 (5%) maka gagal menolak H_0 , diartikan bahwa model *common effect* menjadi yang terbaik.

2. Uji Hausman

Dilakukan untuk membandingkan dan memilih model yang terbaik antara model *random effect* dengan model *fixed effect*. Sebelum melakukan uji ini terdapat hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Model *Random Effect* terbaik

H_a = Model *Fixed Effect* terbaik

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan nilai chi-square dari hasil estimasi, apabila nilai chi-square lebih besar dari chi-square tabel maka menolak H_0 , diartikan bahwa model *fixed effect* merupakan yang terbaik. Apabila nilai chi-square lebih kecil dari chi-square tabel maka gagal menolak H_0 , diartikan bahwa model *random effect* menjadi yang terbaik.

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Dilakukan untuk membandingkan dan memilih model yang terbaik antara model *common effect* dengan model *random effect*. Sebelum melakukan uji ini terdapat hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Model *Common Effect* terbaik

H_a = Model *Random Effect* terbaik

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan nilai probabilitas dari hasil estimasi, apabila nilai probabilitas di lebih kecil dari 0,05 (5%) maka menolak H_0 , diartikan bahwa model *random effect* merupakan yang terbaik. Tetapi, apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 (5%) maka gagal menolak H_0 , diartikan bahwa model *common effect* menjadi yang terbaik.

3.3.4 Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat sejauh mana variabel independen dipengaruhi oleh seluruh variabel dependen. Presentase variabel independen yang dapat menjalankan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi sekitar 0 sampai 1. Pada penelitian ini, menunjukkan sejauh mana pengaruh rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah dapat dilihat terhadap PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila, nilai $F\text{-stat} > F\text{-kritis}$ maka menolak H_0 , berarti keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan, apabila nilai $F\text{-stat} < F\text{-kritis}$ maka gagal menolak H_0 , berarti keseluruhan variabel independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Maka pada penelitian ini terdapat hipotesis uji F sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, Seluruh variabel Rata-rata lama sekolah, Angka

Harapan Hidup, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Pengeluaran Pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel PDRB Per kapita.

$H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ Seluruh variabel Rata-rata lama sekolah, Angka Harapan Hidup, Upah Minimum, dan Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel PDRB Per kapita.

3. Uji Koefisien Secara Individu (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai $t\text{-stat} > t\text{-kritis}$, maka menolak H_0 , berarti variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan, apabila nilai $t\text{-stat} < t\text{-kritis}$, maka gagal menolak H_0 , berarti variabel independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Maka pada penelitian ini terdapat hipotesis uji t sebagai berikut:

1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

$H_0: \beta_1 = 0$ = Maka variabel Rata-rata Lama Sekolah tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap PDRB Per kapita.

$H_a: \beta_1 \neq 0$ = Maka variabel Rata-rata Lama Sekolah terdapat pengaruh signifikan terhadap PDRB Per kapita.

2. Angka Harapan Hidup (AHH)

$H_0: \beta_2 = 0$ = Maka variabel Angka Harapan Hidup tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap PDRB Per kapita.

$H_a: \beta_2 \neq 0$ = Maka variabel Angka Harapan Hidup terdapat pengaruh signifikan terhadap PDRB Per kapita.

3. Upah Minimum Kabupaten/Kota

$H_0: \beta_3 = 0$ = Maka variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap PDRB Per kapita.

$H_a: \beta_3 \neq 0$ = Maka variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota terdapat pengaruh signifikan terhadap PDRB Per kapita.

4. Pengeluaran Pemerintah

$H_0 : \beta_4 = 0$ = Maka variabel Pengeluaran Pemerintah tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap PDRB Per kapita.

$H_a : \beta_4 \neq 0$ = Maka variabel Pengeluaran Pemerintah terdapat pengaruh signifikan terhadap PDRB Per kapita.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel, merupakan gabungan antara cross section dan time series. Data cross section terdiri dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan data time series terdiri dari periode tahun 2004-2023. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DPJK). Didapatkan model penelitian:

4.2 Analisis Deskriptif

Tabel 4.2
Analisis Deskriptif

Variabel	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	RLS (Tahun)	AHH (Tahun)	UMK (Juta Rupiah)	PP (Miliar Rupiah)
Mean	23,16	7,38	72,66	1,17	1455,48
Median	17,25	7,10	72,77	0,97	1218,64
Max	95,50	11,24	77,93	3,06	5340,46
Min	6,47	4,80	65,50	0,36	168,95
Std. Dev	16,20	1,29	2,90	0,61	875,28

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 12

Analisis deskriptif dilakukan berdasarkan data dari tabel 4.1 pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2004-2023 sebagai berikut :

Didapatkan nilai rata-rata pada variabel PDRB per kapita sebesar 22,16 juta rupiah, nilai tertinggi sebesar 95,50 juta rupiah di Kota Semarang pada tahun 2023, nilai terendah sebesar 6,47 juta rupiah di Kabupaten Pemalang pada tahun 2004, dan standar deviasi sebesar 16,20 juta rupiah. Didapatkan nilai rata-rata pada variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,38 tahun, nilai tertinggi sebesar 11,24 tahun di Kota Salatiga pada tahun 2023, nilai terendah sebesar 4,80 tahun di Kabupaten Brebes pada tahun 2004, nilai standar deviasi sebesar 1,29 tahun. Didapatkan nilai rata-rata pada variabel Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 72,66 tahun, nilai tertinggi sebesar 77,93 tahun di Kota Salatiga pada tahun 2023, nilai terendah sebesar 65,50 tahun di Kabupaten Brebes pada tahun 2004, nilai standar deviasi sebesar 2,90. Didapatkan nilai

rata-rata pada variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 1,17 juta rupiah, nilai tertinggi sebesar 3,06 juta rupiah di Kota Semarang pada tahun 2023, nilai terendah sebesar 0,36 di Kabupaten Blora pada tahun 2004, nilai standar deviasi sebesar 0,61 juta rupiah. Didapatkan nilai rata-rata pada variabel Pengeluaran Pemerintah (PP) sebesar 1455,48 miliar rupiah, nilai tertinggi sebesar 5340,46 miliar rupiah di Kota Semarang pada tahun 2023, nilai terendah sebesar 168,95 miliar rupiah di Kota Salatiga pada tahun 2004, nilai standar deviasi sebesar 875,62 miliar rupiah.

4.3 Hasil Regresi Data Panel

Pada penelitian ini diterapkan regresi data panel untuk menganalisis adakah dalam setiap variabel independen memiliki hubungan positif atau negatif terhadap variabel dependen. Analisis regresi data panel terdapat 3 pendekatan utama, yaitu common effect, random effect, dan fixed effect. Model terbaik dari estimasi ini akan dipilih melalui uji Chow dan uji Hausman.

4.3.1 Uji Chow

Tabel 4.3
Uji Chow

Effect Test	Statistik	d.f.	Prob.
Cross-section F	449.996917	(34,661)	0.0000
Cross-section Chi-Square	2228.900182	34	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 12

Hipotesis Uji Chow sebagai berikut:

H₀ = Model *Common Effect* terbaik

H_a = Model *Fixed Effect* terbaik

Berdasarkan Tabel 4.3, hasil Uji Chow didapatkan nilai probabilitas F-statis dan cross section chi-square sebesar $0,00 < 0,05$ (alpha 5%), maka disimpulkan bahwa menolak H₀, sehingga model yang terbaik adalah *fixed effect model*.

4.3.2 Uji Hausman

Tabel 4.4
Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistik	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	38.152196	4	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 12

Hipotesis Uji Hausman sebagai berikut:

H0 = Model *Random Effect* terbaik

Ha = Model *Fixed Effect* terbaik

Berdasarkan Tabel 4.4, hasil Uji Hausman, didapatkan nilai chi-square sebesar 38,15 > chi-square tabel sebesar 9,48 , maka disimpulkan bahwa menolak H0, sehingga model yang terbaik adalah *fixed effect model*.

4.4 Uji Hipotesis

Tabel 4.5

Hasil Estimasi Fixed Effect

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.076959	0.832253	0.092471	0.9264
LOG RLS	0.064123	0.075492	0.849406	0.3960
LOG AHH	0.422594	0.191395	2.207971	0.0276
LOG UMK	0.234104	0.027015	8.665651	0.0000
LOG PP	0.134570	0.020719	6.495952	0.0000
R-squared		0.982818	F-statistic	994.9931
Adjust R-squared		0.981830	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 12

Berdasarkan dari uji penentuan model yang terbaik dari Uji Chow dan Uji Hausman didapatkan hasil bahwa *fixed effect model* adalah model terbaik untuk dilakukan hipotesis di penelitian ini. Uji hipotesis dilakukan untuk menguji hipotesis yang ada di penelitian ini apakah dapat diterima atau ditolak dari melihat nilai t hitunda dan t tabel, dan F hitung dan F tabel. Pada penelitian ini menggunakan koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t.

4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 4.5, didapatkan nilai *R-squared* sebesar 0.98, yang dapat diartikan bahwa variabel Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Pengeluaran Pemerintah dapat menjelaskan variabel PDRB Per kapita sekitar 98,28% dan sisanya sebesar 1,72% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.4.2 Uji F Statistic (F-test)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah seluruh variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 4.5 didapatkan nilai F

hitung sebesar 994,99, serta besar nilai F kritis untuk *degree of freedom* 4 dan 695 adalah 2,38, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa menolak H_0 , sehingga variabel Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh terhadap variabel PDRB Per kapita.

4.4.3 Uji t

Berdasarkan tabel 4.5, uji t dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan jumlah observasi sebesar 700 dan *degree of freedom* lebih dari 120 dengan α 0.05, maka nilai t tabel sebesar 1,96.

1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Didapatkan nilai t hitung sebesar $0,84 < t_{tabel}$ 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa gagal menolak H_0 , sehingga dapat disimpulkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Per kapita.

2. Angka Harapan Hidup (AHH)

Didapatkan nilai t hitung sebesar $2,20 > t_{tabel}$ 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa menolak H_0 , sehingga dapat disimpulkan Angka Harapan Hidup berpengaruh signifikan terhadap PDRB Per kapita.

3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Didapatkan nilai t hitung sebesar $8,66 > t_{tabel}$ 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa menolak H_0 , sehingga dapat disimpulkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh signifikan terhadap PDRB Per kapita.

4. Pengeluaran Pemerintah (PP)

Didapatkan nilai t hitung sebesar $6,49 > t_{tabel}$ 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa menolak H_0 , sehingga Pengeluaran Pemerintah bersifat positif dan berpengaruh signifikan terhadap PDRB Per kapita.

4.5 Pembahasan Hasil

Berdasarkan penelitian ini, didapatkan hasil bahwa rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini berbeda dengan hipotesis yang diduga variabel rata-

rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh (Fahlewi et al., 2020) yang menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa tingkat pendidikan menggunakan indikator rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap PDRB per kapita hal tersebut di sebabkan oleh rendahnya presentase tingkat pendidikan, rata-rata penduduk pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah hanya dapat menyelesaikan pendidikan tingkat SMP dan yang sederejat hal ini bersumber pada Badan Pusat Statistik (BPS). Tingkat pendidikan yang rendah masih belum dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan penelitian ini, didapatkan hasil bahwa angka harapan hidup berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Didapatkan nilai koefisien angka harapan hidup sebesar 0.42, yang menunjukkan apabila ada kenaikan 1% pada angka harapan hidup, maka besarnya PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah meningkat sebesar 0.42% dengan asumsi bahwa faktor lain tetap. Hasil penelitian ini sama dengan hipotesis yang diduga variabel angka harapan hidup berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh (Sitorus et al., 2024) yang menunjukkan angka harapan hidup berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita di Indonesia. Semakin tinggi angka harapan hidup di suatu daerah mencerminkan semakin lama orang tersebut dapat bekerja dan produktif yang akan mendorong PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah. Dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kesehatan publik dan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan dapat mendorong PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan penelitian ini, didapatkan hasil bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Didapatkan nilai koefisien pada upah minimum kabupaten/kota sebesar 0.23, yang menunjukkan apabila ada kenaikan 1% pada upah minimum kabupaten/kota, maka besarnya PDRB per kapita pada 35

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah meningkat sebesar 0.23% dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Hasil penelitian ini sama dengan hipotesis yang diduga variabel upah minimum kabupaten/kota signifikan terhadap PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh (Hasbi et al., 2019) yang menunjukkan hasil bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini sejalan juga dengan (Saskia et al., 2022) yang menunjukkan UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita di Wilayah Sumatera. Dapat disimpulkan berdasarkan penelitian ini bahwa upah minimum kabupaten/kota dapat mempengaruhi PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dikarenakan ketika upah meningkat maka tingkat konsumsi penduduk juga akan meningkat yang membuat pendapatan masyarakat meningkat sehingga kesejahteraan dan PDRB per kapita ikut meningkat. Dan hal ini sejalan dengan meningkatnya PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Didapatkan nilai koefisien pengeluaran pemerintah sebesar 0.13, yang menunjukkan apabila ada kenaikan 1% pada pengeluaran pemerintah, maka besarnya PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah meningkat sebesar 0.13% dengan asumsi semua faktor lain tetap. Hasil penelitian ini sama dengan hipotesis yang diduga variabel pengeluaran pemerintah signifikan terhadap PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh (Fahrudin & Aji, 2021) yang menunjukkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB per kapita di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa dengan naiknya pengeluaran pemerintah yang tepat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka lapangan pekerjaan yang baru, sehingga dapat mendorong meningkatnya PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini telah dilakukan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2004-2023. Hal tersebut terjadi karena tingkat pendidikan masih rendah.
2. Angka harapan hidup berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2004-2023. Hal tersebut terjadi karena penyelenggaraan kesehatan publik dan layanan kesehatan sudah terlaksana secara efisien dan efektif
3. Upah minimum kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2004-2023. Hal tersebut terjadi karenakan apabila upah minimum meningkat, maka akan membuat konsumsi masyarakat meningkat yang akan mendorong pendapatan per kapita.
4. Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2004-2023. Hal tersebut terjadi karena pengeluaran pemerintah sudah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lapangan baru dengan pengeluaran yang efektif dan efisien

5.2 Implikasi

Dari penelitian ini telah dilakukan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, berdasarkan hal tersebut berikut implikasi yang dapat diambil:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah daerah untuk tetap melanjutkan tren positif ini dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan akses terhadap fasilitas kesehatan di setiap kabupaten/kota. Dengan hal tersebut kualitas sumber daya manusia akan meningkat dan lebih produktif untuk mendorong pendapatan per kapita.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten/kota

berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menandakan bahwa dengan pemberian upah yang tepat dapat mendorong meningkatnya pendapatan per kapita. Pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan upah minimum agar meningkatnya produktivitas masyarakat dan mendukung meningkatnya daya beli masyarakat yang akan mendorong meningkatnya pendapatan perkapita.

3. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menandakan bahwa pengeluaran pemerintah sudah mampu mendorong meningkatnya pendapatan per kapita. Pemerintah daerah diharapkan untuk membuat kebijakan yang efektif agar investasi pemerintah, terutama bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya dapat diarahkan secara efisien untuk memaksimalkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, A., SI, M. F., & Risma, O. R. (2019). Analisis Tingkat Pendidikan Dan Tpk Terhadap PDRB Perkapita Di Indonesia. *Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 5(2), 46–55. <https://doi.org/10.35308/ekombis.v5i2.1363>
- Aprianda, H. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Standar Hidup Antar Provinsi Di Indonesia*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6423>
- Becker, G. S. (1962). Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. *Journal of Political Economy*, 70(5), 9–49. <http://www.jstor.org/stable/1829103>
- BPS. (2023). *Rata-rata Lama Sekolah tahun 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. <https://karanganyarkab.bps.go.id/id/news/2024/03/15/144/rata-rata-lama-sekolah-tahun-2023.html>
- Endarti, A. T. (2015). Kualitas Hidup Kesehatan: Konsep, Model, dan Penggunaan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 7(2), 97.
- Fahlewi, R., Amri, R. C., & Sari, A. M. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Selatan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(1), 354–363. <https://doi.org/10.31539/costing.v4i1.1805>
- Fahrudin, A., & Aji, T. S. (2021). Pengaruh Remitansi, Pengeluaran Pemerintah, dan FDI Terhadap PDB per Kapita Indonesia. *Independent: Journal of Economics*, 1(1), 85–104. <https://doi.org/10.26740/independent.v1n1.p85-104>
- Hartini, N. T. (2015). Pengaruh Pdrb Per Kapita, Investasi Dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Diy Tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 6(6), 530–539.
- Hasbi, A. R., Dahri, A., & Salju, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Pendapatan Perkapita Di Kabupaten Luwu Timur. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 45–63. <https://doi.org/10.35906/je001.v8i1.332>
- Hepi, & Zakiah, W. (2018). Pengaruh Angka Harapan Hidup dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap PDRB Perkapita Serta Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah 2011-2015. *Palangka Raya*, 4(1).
- Humairah, Z. (2023). Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri Dan Pengeluaran

- Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3, 761–779. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v3i3.4215>
- Kusuma Nigrum, D. A. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Belanja Bidang Kesehatan terhadap Pertumbuhan PDRB Perkapita di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 698–706. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i3.625>
- Laksono, H. R. A. (2013). *Menuju Indonesia emas: gerakan bersama mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera* (S. Masdi (ed.)). Kementrian Koordinatur Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.
- Lilya, N., & Dewi, S. (2012). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3, 106–114. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/8161>
- Mangkoesebroto, G. (2014). *Ekonomi Publik* (ketiga). Yogyakarta: BPFE.
- Romadhon, D. R. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Pengeluaran, 2019-2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Saskia, S. N., Ekonomi Pembangunan, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2022). Pengaruh Tenaga Kerja, UMP, dan PAD Terhadap PDRB Per Kapita di Wilayah Sumatera 2010-2020. *Convergence: The Journal Of Economic Development*, 4(1), 54–68. <https://doi.org/10.33369/convergencejep.v4i1.23021>
- Schultz, T. W. (1961). “Investment in Human Capital”. The American Economic Association. *American Economic Association*, 51(1), 1–17. <https://www.jstor.org/stable/1818907>
- Shintia, N., & Abbas, S. (2019). Penetapan Upah Minimum Di Provinsi Aceh. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(1), 164. <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i1.5091>
- Sitorus, Y. F., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Kesehatan Terhadap PDRB Per Kapita Di Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 110–121. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.692>
- Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*

(Pertama). Graha Ilmu.

- Syuhada, L. O. M. T., Rindayati, W., & Juanda, B. (2023). Keterkaitan Belanja Pemerintah terhadap PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 7(2), 250–262. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2023.7.2.250-262>
- Tarigan, W. J. (2020). Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Dan Rasio Beban Ketergantungan Hidup Terhadap Tabungan Domestik Sumatera Utara. *Ekuilnomi: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 135–148. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i2.73>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. Jakarta : Erlangga.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Wijaya, F. A. (2019). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kab/Kota Di Jawa Timur). *Jurnal Simki Economic*, 3, 19–40. <https://doi.org/10.29407/jse.v3i2.27>
- Winarni, E., Sari, Y., & Amali, M. (2023). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap PDRB Perkapita Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1182. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1394>
- Yuningsih, R. (2019). Strategi Promosi Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Sanitasi Lingkungan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(2), 107–118. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v10i2.1391>
- Zahari, M. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. *Journal of Economics and Business*, 1, 180–196. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.18>

LAMPIRAN
Lampiran I Data Penelitian

CODE	YEAR	PDRB PERKAPITA	RLS	AHH	UMK	PP
Kab. Banjarnegara	2004	8,03	5,7	68,1	0,38	344,79
Kab. Banjarnegara	2005	8,23	5,8	68,2	0,42	379,63
Kab. Banjarnegara	2006	9,03	5,8	68,4	0,49	506,68
Kab. Banjarnegara	2007	9,44	5,98	68,51	0,51	554,49
Kab. Banjarnegara	2008	9,84	5,98	68,72	0,55	716,24
Kab. Banjarnegara	2009	10,28	6,2	68,88	0,64	735,34
Kab. Banjarnegara	2010	10,86	5,84	69,04	0,66	864,06
Kab. Banjarnegara	2011	11,37	5,84	69,2	0,73	1.037,96
Kab. Banjarnegara	2012	11,76	5,85	69,36	0,77	1.111,15
Kab. Banjarnegara	2013	12,41	5,86	73,34	0,84	1.175,47
Kab. Banjarnegara	2014	12,98	5,9	73,39	0,92	1.349,77
Kab. Banjarnegara	2015	13,60	6,17	73,59	1,11	1.612,22
Kab. Banjarnegara	2016	14,25	6,26	73,69	1,27	2.017,38
Kab. Banjarnegara	2017	14,97	6,27	73,79	1,37	2.178,82
Kab. Banjarnegara	2018	15,72	6,28	73,91	1,49	2.119,10
Kab. Banjarnegara	2019	16,52	6,5	74,01	1,61	2.123,03
Kab. Banjarnegara	2020	14,78	6,74	74,18	1,75	2.030,53
Kab. Banjarnegara	2021	15,13	6,75	74,28	1,81	2.042,02
Kab. Banjarnegara	2022	15,75	6,84	74,37	1,82	2.039,21
Kab. Banjarnegara	2023	16,40	6,86	74,47	1,96	2.176,00
Kab. Banyumas	2004	11,39	6,9	69,2	0,38	488,53
Kab. Banyumas	2005	11,62	7	69,4	0,42	499,93
Kab. Banyumas	2006	12,47	7	69,5	0,49	567,21
Kab. Banyumas	2007	13,09	7,49	69,52	0,52	870,73
Kab. Banyumas	2008	13,72	7,49	69,61	0,55	1.046,09
Kab. Banyumas	2009	14,41	7,72	69,67	0,61	1.070,01
Kab. Banyumas	2010	14,81	6,82	69,72	0,67	1.178,38

Kab. Banyumas	2011	15,62	6,94	69,78	0,75	1.476,27
Kab. Banyumas	2012	16,21	7,06	69,83	0,80	1.732,24
Kab. Banyumas	2013	17,31	7,18	72,89	0,88	2.018,05
Kab. Banyumas	2014	18,12	7,31	72,92	1,00	2.285,33
Kab. Banyumas	2015	19,05	7,31	73,12	1,10	2.531,67
Kab. Banyumas	2016	20,02	7,39	73,23	1,35	2.902,85
Kab. Banyumas	2017	21,11	7,4	73,33	1,46	3.200,69
Kab. Banyumas	2018	22,28	7,41	73,45	1,59	3.319,06
Kab. Banyumas	2019	23,50	7,42	73,55	1,75	3.457,55
Kab. Banyumas	2020	22,02	7,52	73,72	1,90	3.249,14
Kab. Banyumas	2021	22,73	7,63	73,8	1,97	3.430,88
Kab. Banyumas	2022	23,85	7,78	73,88	1,98	3.600,85
Kab. Banyumas	2023	24,83	7,87	73,98	2,12	3.500,83
Kab. Batang	2004	10,94	5,6	69	0,40	325,41
Kab. Batang	2005	11,07	5,8	69,1	0,43	309,37
Kab. Batang	2006	11,96	5,8	69,2	0,50	387,88
Kab. Batang	2007	12,33	5,97	69,38	0,56	478,81
Kab. Batang	2008	12,71	6,02	69,66	0,62	592,13
Kab. Batang	2009	13,12	6,34	69,88	0,70	628,08
Kab. Batang	2010	13,37	5,62	70,11	0,75	569,73
Kab. Batang	2011	14,04	5,66	70,34	0,81	796,25
Kab. Batang	2012	14,40	5,7	70,57	0,88	900,21
Kab. Batang	2013	15,22	5,88	74,38	0,97	1.067,41
Kab. Batang	2014	15,88	6	74,4	1,15	1.212,28
Kab. Batang	2015	16,59	6,41	74,42	1,27	1.368,16
Kab. Batang	2016	17,27	6,42	74,46	1,47	1.560,79
Kab. Batang	2017	18,08	6,61	74,5	1,60	1.563,18
Kab. Batang	2018	18,95	6,62	74,56	1,75	1.687,22
Kab. Batang	2019	19,81	6,63	74,59	1,90	1.755,07
Kab. Batang	2020	18,75	6,87	74,69	2,06	1.662,51
Kab. Batang	2021	19,53	6,88	74,74	2,13	1.780,43

Kab. Batang	2022	20,53	6,9	74,79	2,14	1.801,91
Kab. Batang	2023	21,27	7,07	74,85	2,28	1.800,61
Kab. Blora	2004	9,27	5,7	70,5	0,37	377,67
Kab. Blora	2005	9,58	6,02	70,9	0,39	370,60
Kab. Blora	2006	10,10	6,02	71	0,45	393,77
Kab. Blora	2007	10,46	6,02	71,01	0,60	537,69
Kab. Blora	2008	11,02	6,02	71,13	0,62	767,52
Kab. Blora	2009	11,53	6,25	71,2	0,68	804,64
Kab. Blora	2010	12,23	5,48	71,34	0,74	797,08
Kab. Blora	2011	12,71	5,77	71,41	0,82	925,82
Kab. Blora	2012	13,12	5,83	71,48	0,86	1.125,14
Kab. Blora	2013	13,87	5,9	73,79	0,93	1.318,48
Kab. Blora	2014	14,41	6,02	73,84	1,01	1.468,21
Kab. Blora	2015	15,12	6,04	73,85	1,18	1.669,97
Kab. Blora	2016	18,60	6,18	73,88	1,33	1.951,82
Kab. Blora	2017	19,64	6,45	73,99	1,44	1.981,35
Kab. Blora	2018	20,42	6,46	74,12	1,56	2.116,48
Kab. Blora	2019	21,18	6,58	74,23	1,69	2.201,54
Kab. Blora	2020	19,77	6,83	74,41	1,83	2.109,12
Kab. Blora	2021	20,46	6,99	74,51	1,89	2.113,77
Kab. Blora	2022	20,95	7,01	74,6	1,90	2.396,22
Kab. Blora	2023	21,28	7,08	74,71	2,04	2.355,51
Kab. Boyolali	2004	11,51	6,9	69,9	0,39	395,62
Kab. Boyolali	2005	11,86	7,1	70	0,41	382,08
Kab. Boyolali	2006	12,53	7,1	70,1	0,49	471,11
Kab. Boyolali	2007	12,98	7,1	70,11	0,57	704,66
Kab. Boyolali	2008	13,42	7,1	70,24	0,62	793,26
Kab. Boyolali	2009	14,03	7,29	70,3	0,72	808,02
Kab. Boyolali	2010	14,75	6,5	70,37	0,75	909,09
Kab. Boyolali	2011	15,58	6,53	70,43	0,80	1.101,85
Kab. Boyolali	2012	16,12	6,55	70,49	0,84	1.269,23

Kab. Boyolali	2013	17,09	6,61	75,58	0,90	1.421,83
Kab. Boyolali	2014	17,90	6,69	75,61	1,12	1.617,99
Kab. Boyolali	2015	18,86	7,1	75,63	1,20	1.832,77
Kab. Boyolali	2016	19,75	7,17	75,67	1,40	2.057,28
Kab. Boyolali	2017	20,78	7,44	75,72	1,52	2.148,43
Kab. Boyolali	2018	21,85	7,55	75,79	1,65	2.203,11
Kab. Boyolali	2019	23,03	7,56	75,83	1,79	2.381,60
Kab. Boyolali	2020	21,09	7,84	75,95	1,94	2.339,81
Kab. Boyolali	2021	21,91	7,85	76,03	2,00	2.268,51
Kab. Boyolali	2022	23,09	8,08	76,12	2,01	2.471,83
Kab. Boyolali	2023	24,16	8,09	76,23	2,16	2.433,81
Kab. Brebes	2004	8,51	4,8	65,5	0,39	475,28
Kab. Brebes	2005	8,77	5,5	66,3	0,42	466,16
Kab. Brebes	2006	9,44	5,5	66,5	0,50	589,35
Kab. Brebes	2007	9,83	5,5	66,75	0,52	818,65
Kab. Brebes	2008	10,23	5,5	67,08	0,55	973,15
Kab. Brebes	2009	10,67	5,62	67,37	0,58	926,44
Kab. Brebes	2010	11,63	5,09	67,67	0,68	1.100,00
Kab. Brebes	2011	12,34	5,24	67,96	0,72	1.304,00
Kab. Brebes	2012	12,70	5,38	68,26	0,78	1.440,49
Kab. Brebes	2013	13,49	5,68	67,81	0,86	1.661,30
Kab. Brebes	2014	14,14	5,86	67,9	1,00	1.967,17
Kab. Brebes	2015	14,92	5,88	68,2	1,17	2.392,38
Kab. Brebes	2016	15,61	6,17	68,41	1,31	2.946,27
Kab. Brebes	2017	16,43	6,18	68,61	1,42	2.767,38
Kab. Brebes	2018	17,23	6,19	68,84	1,54	2.825,36
Kab. Brebes	2019	18,16	6,2	69,04	1,67	3.132,25
Kab. Brebes	2020	16,52	6,21	69,33	1,81	2.955,05
Kab. Brebes	2021	16,83	6,22	69,54	1,87	3.126,23
Kab. Brebes	2022	17,61	6,35	69,74	1,89	3.091,29
Kab. Brebes	2023	17,98	6,4	69,96	2,02	2.989,01

Kab. Cilacap	2004	34,72	6,4	69	0,40	507,79
Kab. Cilacap	2005	36,98	6,6	69,5	0,43	551,37
Kab. Cilacap	2006	40,12	6,6	69,6	0,48	822,19
Kab. Cilacap	2007	41,15	6,6	69,86	0,55	1.016,30
Kab. Cilacap	2008	43,55	6,6	70,2	0,59	1.172,49
Kab. Cilacap	2009	44,13	6,72	70,51	0,66	1.167,97
Kab. Cilacap	2010	45,73	6,26	70,82	0,70	1.237,24
Kab. Cilacap	2011	47,31	6,27	71,12	0,72	1.550,28
Kab. Cilacap	2012	47,45	6,28	71,43	0,77	1.792,59
Kab. Cilacap	2013	48,34	6,43	72,75	0,89	2.047,16
Kab. Cilacap	2014	49,47	6,48	72,8	1,02	2.205,74
Kab. Cilacap	2015	52,14	6,58	73	1,20	2.657,12
Kab. Cilacap	2016	54,51	6,9	73,11	1,53	3.150,33
Kab. Cilacap	2017	55,65	6,91	73,24	1,69	3.014,11
Kab. Cilacap	2018	57,05	6,92	73,39	1,84	2.985,42
Kab. Cilacap	2019	58,09	6,93	73,52	1,99	3.283,32
Kab. Cilacap	2020	46,28	6,97	73,73	2,16	3.088,83
Kab. Cilacap	2021	46,82	7,09	73,9	2,23	3.329,81
Kab. Cilacap	2022	48,62	7,18	74,07	2,23	3.402,04
Kab. Cilacap	2023	50,72	7,39	74,25	2,38	3.501,11
Kab. Demak	2004	8,78	6,5	69,4	0,41	335,46
Kab. Demak	2005	8,89	7	69,5	0,44	265,38
Kab. Demak	2006	9,74	7	70	0,50	422,32
Kab. Demak	2007	10,07	7	70,31	0,58	598,23
Kab. Demak	2008	10,39	7	70,69	0,65	690,80
Kab. Demak	2009	10,73	7,26	71,04	0,77	747,26
Kab. Demak	2010	11,03	6,56	71,24	0,81	825,29
Kab. Demak	2011	11,49	6,75	71,59	0,85	1.086,72
Kab. Demak	2012	11,75	6,88	71,95	0,89	1.208,57
Kab. Demak	2013	12,33	7,22	75,16	1,00	1.338,42
Kab. Demak	2014	12,73	7,44	75,18	1,28	1.560,96

Kab. Demak	2015	13,34	7,45	75,21	1,54	1.791,58
Kab. Demak	2016	13,88	7,46	75,27	1,75	2.065,36
Kab. Demak	2017	14,54	7,47	75,27	1,90	1.986,48
Kab. Demak	2018	15,18	7,48	75,29	2,07	2.050,07
Kab. Demak	2019	15,84	7,55	75,31	2,24	2.309,82
Kab. Demak	2020	15,26	7,71	75,4	2,43	2.285,74
Kab. Demak	2021	15,55	7,86	75,46	2,51	2.336,02
Kab. Demak	2022	16,22	8,1	75,52	2,51	2.487,34
Kab. Demak	2023	16,80	8,27	75,6	2,68	2.423,26
Kab. Grobogan	2004	7,35	6,1	68,3	0,37	473,48
Kab. Grobogan	2005	7,58	6,6	68,4	0,39	452,08
Kab. Grobogan	2006	7,98	6,6	69,1	0,45	500,75
Kab. Grobogan	2007	8,28	6,6	69,21	0,50	718,23
Kab. Grobogan	2008	8,66	6,6	69,42	0,56	831,04
Kab. Grobogan	2009	9,03	6,76	69,57	0,64	788,92
Kab. Grobogan	2010	9,75	6,13	69,73	0,69	901,49
Kab. Grobogan	2011	10,00	6,18	69,89	0,74	1.173,21
Kab. Grobogan	2012	10,34	6,23	70,05	0,79	1.203,54
Kab. Grobogan	2013	10,83	6,25	74,03	0,84	1.507,95
Kab. Grobogan	2014	11,21	6,32	74,07	0,94	1.645,80
Kab. Grobogan	2015	11,81	6,33	74,27	1,16	1.979,19
Kab. Grobogan	2016	12,28	6,62	74,37	1,31	2.331,27
Kab. Grobogan	2017	12,94	6,66	74,46	1,44	2.553,15
Kab. Grobogan	2018	13,63	6,67	74,55	1,56	2.345,54
Kab. Grobogan	2019	14,29	6,86	74,61	1,69	2.551,23
Kab. Grobogan	2020	13,34	6,91	74,75	1,83	2.511,27
Kab. Grobogan	2021	13,77	7,11	74,84	1,89	2.428,63
Kab. Grobogan	2022	14,50	7,26	74,93	1,89	2.687,13
Kab. Grobogan	2023	14,99	7,28	75,04	2,03	2.664,04
Kab. Jepara	2004	9,71	6,7	70,1	0,41	385,53
Kab. Jepara	2005	9,89	6,9	70,2	0,44	401,14

Kab. Jepara	2006	10,50	6,9	70,3	0,53	539,72
Kab. Jepara	2007	10,84	7,22	70,39	0,54	645,44
Kab. Jepara	2008	11,15	7,22	70,58	0,59	744,07
Kab. Jepara	2009	11,53	7,4	70,71	0,65	758,11
Kab. Jepara	2010	12,16	6,52	70,85	0,70	852,32
Kab. Jepara	2011	12,55	6,72	70,99	0,76	1.130,21
Kab. Jepara	2012	12,95	6,96	71,13	0,80	1.297,08
Kab. Jepara	2013	13,55	7,09	75,63	0,88	1.351,53
Kab. Jepara	2014	13,99	7,29	75,64	1,00	1.505,22
Kab. Jepara	2015	14,48	7,31	75,65	1,15	1.856,34
Kab. Jepara	2016	14,99	7,32	75,67	1,35	2.157,98
Kab. Jepara	2017	15,58	7,33	75,68	1,60	2.215,46
Kab. Jepara	2018	16,26	7,43	75,71	1,74	2.300,57
Kab. Jepara	2019	17,00	7,44	75,74	1,88	2.337,61
Kab. Jepara	2020	17,70	7,68	75,84	2,04	2.268,05
Kab. Jepara	2021	18,46	7,79	75,91	2,11	2.309,41
Kab. Jepara	2022	19,49	8,09	75,97	2,11	2.429,31
Kab. Jepara	2023	20,02	8,26	76,04	2,27	2.431,68
Kab. Karanganyar	2004	14,55	6,9	71,8	0,40	351,19
Kab. Karanganyar	2005	15,09	7	71,8	0,42	348,88
Kab. Karanganyar	2006	16,55	7	71,9	0,50	546,04
Kab. Karanganyar	2007	17,37	7	71,92	0,58	582,63
Kab. Karanganyar	2008	18,14	7,05	72,05	0,65	772,83
Kab. Karanganyar	2009	18,98	7,17	72,13	0,72	784,27
Kab. Karanganyar	2010	20,16	7,26	72,2	0,76	876,23
Kab. Karanganyar	2011	20,94	7,46	72,28	0,80	980,18
Kab. Karanganyar	2012	21,72	7,8	72,36	0,85	1.173,21
Kab. Karanganyar	2013	22,92	8,38	76,7	0,90	1.287,16
Kab. Karanganyar	2014	23,89	8,47	76,71	1,06	1.609,31
Kab. Karanganyar	2015	24,86	8,48	77,11	1,23	1.775,94
Kab. Karanganyar	2016	25,97	8,49	77,11	1,42	2.086,31

Kab. Karanganyar	2017	27,23	8,5	77,31	1,56	2.066,49
Kab. Karanganyar	2018	28,61	8,51	77,36	1,70	2.064,58
Kab. Karanganyar	2019	30,00	8,52	77,38	1,83	2.262,02
Kab. Karanganyar	2020	28,01	8,56	77,47	1,99	2.092,03
Kab. Karanganyar	2021	28,80	8,57	77,55	2,05	2.138,94
Kab. Karanganyar	2022	30,21	8,79	77,64	2,06	2.203,43
Kab. Karanganyar	2023	31,63	9,02	77,72	2,21	2.299,20
Kab. Kebumen	2004	7,97	6,4	68,4	0,37	427,80
Kab. Kebumen	2005	8,18	6,5	68,7	0,41	413,26
Kab. Kebumen	2006	8,55	6,5	69,1	0,47	618,43
Kab. Kebumen	2007	8,89	6,65	69,11	0,51	832,71
Kab. Kebumen	2008	9,35	6,65	69,21	0,55	841,24
Kab. Kebumen	2009	9,67	6,84	69,26	0,65	945,21
Kab. Kebumen	2010	10,61	6,21	69,32	0,70	1.009,11
Kab. Kebumen	2011	11,24	6,29	69,37	0,73	1.216,96
Kab. Kebumen	2012	11,60	6,3	69,43	0,77	1.412,50
Kab. Kebumen	2013	12,18	6,39	72,61	0,84	1.548,18
Kab. Kebumen	2014	12,84	6,75	72,67	0,98	1.906,50
Kab. Kebumen	2015	13,60	7,04	72,77	1,16	2.285,36
Kab. Kebumen	2016	14,24	7,05	72,87	1,32	2.707,06
Kab. Kebumen	2017	14,93	7,29	72,98	1,43	2.630,27
Kab. Kebumen	2018	15,71	7,34	73,11	1,56	2.652,05
Kab. Kebumen	2019	16,54	7,53	73,22	1,69	2.809,55
Kab. Kebumen	2020	14,46	7,54	73,4	1,84	2.737,86
Kab. Kebumen	2021	14,87	7,55	73,55	1,90	2.779,84
Kab. Kebumen	2022	15,56	7,85	73,7	1,91	2.824,36
Kab. Kebumen	2023	16,20	7,86	73,83	2,04	2.977,14
Kab. Kendal	2004	16,37	6,4	66,3	0,41	396,81
Kab. Kendal	2005	16,61	6,69	66,7	0,44	334,61
Kab. Kendal	2006	16,70	6,69	67,1	0,56	512,16
Kab. Kendal	2007	17,18	6,69	67,4	0,62	595,19

Kab. Kendal	2008	17,65	6,69	67,77	0,66	756,33
Kab. Kendal	2009	18,37	6,9	68,1	0,73	789,58
Kab. Kendal	2010	20,88	6,11	68,44	0,78	908,12
Kab. Kendal	2011	22,05	6,24	68,77	0,84	1.109,89
Kab. Kendal	2012	22,75	6,36	69,1	0,90	1.163,99
Kab. Kendal	2013	24,15	6,42	74,11	0,95	1.270,62
Kab. Kendal	2014	25,18	6,53	74,14	1,21	1.414,35
Kab. Kendal	2015	26,28	6,64	74,15	1,38	1.692,49
Kab. Kendal	2016	27,52	6,65	74,2	1,64	1.954,98
Kab. Kendal	2017	28,89	6,85	74,24	1,77	2.091,83
Kab. Kendal	2018	30,33	7,05	74,3	1,93	2.148,48
Kab. Kendal	2019	31,84	7,25	74,33	2,08	2.331,68
Kab. Kendal	2020	29,90	7,45	74,43	2,26	2.041,11
Kab. Kendal	2021	30,86	7,46	74,48	2,34	2.069,96
Kab. Kendal	2022	32,35	7,71	74,53	2,34	2.499,01
Kab. Kendal	2023	33,52	7,73	74,58	2,51	2.475,09
Kab. Klaten	2004	12,38	7,5	70,5	0,39	494,98
Kab. Klaten	2005	12,81	7,7	70,7	0,41	518,21
Kab. Klaten	2006	13,26	7,7	70,8	0,48	585,38
Kab. Klaten	2007	13,67	7,7	70,93	0,54	866,11
Kab. Klaten	2008	14,15	7,75	71,15	0,61	1.000,36
Kab. Klaten	2009	14,70	7,93	71,33	0,69	981,12
Kab. Klaten	2010	15,05	7,33	71,5	0,74	1.043,89
Kab. Klaten	2011	15,92	7,35	71,67	0,77	1.316,71
Kab. Klaten	2012	16,57	7,43	71,84	0,81	1.439,62
Kab. Klaten	2013	17,62	7,74	76,52	0,87	1.621,60
Kab. Klaten	2014	18,56	7,92	76,54	1,03	1.884,33
Kab. Klaten	2015	19,47	8,16	76,55	1,17	2.077,79
Kab. Klaten	2016	20,40	8,22	76,59	1,40	2.282,33
Kab. Klaten	2017	21,41	8,23	76,62	1,53	2.481,86
Kab. Klaten	2018	22,50	8,24	76,67	1,66	2.611,01

Kab. Klaten	2019	23,66	8,31	76,68	1,80	2.682,36
Kab. Klaten	2020	21,80	8,58	76,78	1,95	2.545,16
Kab. Klaten	2021	22,51	8,81	76,86	2,01	2.493,41
Kab. Klaten	2022	23,68	9,09	76,95	2,02	2.527,62
Kab. Klaten	2023	24,87	9,27	77,07	2,15	2.843,76
Kab. Kudus	2004	57,05	7,1	69	0,42	335,57
Kab. Kudus	2005	58,52	7,8	69,2	0,45	317,65
Kab. Kudus	2006	59,55	7,8	69,4	0,52	378,72
Kab. Kudus	2007	60,71	7,8	69,41	0,65	603,79
Kab. Kudus	2008	62,17	7,8	69,51	0,67	729,76
Kab. Kudus	2009	63,71	8,11	69,57	0,75	869,17
Kab. Kudus	2010	68,09	7,45	69,62	0,78	903,11
Kab. Kudus	2011	70,00	7,48	69,68	0,84	950,51
Kab. Kudus	2012	71,18	7,6	69,73	0,89	1.152,27
Kab. Kudus	2013	73,93	7,73	76,39	0,99	1.155,49
Kab. Kudus	2014	76,24	7,83	76,4	1,15	1.508,27
Kab. Kudus	2015	78,23	7,84	76,41	1,38	1.706,85
Kab. Kudus	2016	79,24	7,85	76,43	1,61	2.149,04
Kab. Kudus	2017	80,83	8,31	76,44	1,74	2.007,00
Kab. Kudus	2018	82,48	8,62	76,47	1,89	1.957,70
Kab. Kudus	2019	84,06	8,63	76,5	2,04	2.061,66
Kab. Kudus	2020	83,57	8,75	76,6	2,22	1.914,63
Kab. Kudus	2021	81,97	8,76	76,68	2,29	1.879,12
Kab. Kudus	2022	83,39	9,06	76,76	2,29	2.231,50
Kab. Kudus	2023	83,45	9,34	76,86	2,44	2.384,82
Kab. Magelang	2004	9,37	6,6	69,4	0,39	417,63
Kab. Magelang	2005	9,68	7,1	69,7	0,41	437,16
Kab. Magelang	2006	10,30	7,1	69,9	0,50	621,00
Kab. Magelang	2007	10,76	7,1	69,9	0,54	734,90
Kab. Magelang	2008	11,21	7,1	70,01	0,61	853,63
Kab. Magelang	2009	11,64	7,26	70,07	0,70	850,31

Kab. Magelang	2010	12,15	6,46	70,12	0,75	972,06
Kab. Magelang	2011	12,83	6,73	70,18	0,80	1.062,38
Kab. Magelang	2012	13,18	6,8	70,23	0,87	1.146,50
Kab. Magelang	2013	13,93	6,88	73,21	0,94	1.128,16
Kab. Magelang	2014	14,54	7,02	73,25	1,15	1.655,06
Kab. Magelang	2015	15,15	7,19	73,27	1,26	1.744,73
Kab. Magelang	2016	15,82	7,4	73,33	1,41	2.073,80
Kab. Magelang	2017	16,54	7,41	73,39	1,57	2.451,44
Kab. Magelang	2018	17,26	7,57	73,47	1,74	2.486,54
Kab. Magelang	2019	18,02	7,77	73,56	1,88	2.568,59
Kab. Magelang	2020	17,59	7,78	73,72	2,04	2.304,38
Kab. Magelang	2021	18,12	7,79	73,88	2,08	2.413,16
Kab. Magelang	2022	19,01	7,81	74,03	2,08	2.570,33
Kab. Magelang	2023	19,70	7,82	74,2	2,24	2.687,82
Kab. Pati	2004	11,89	6,2	72,5	0,40	437,34
Kab. Pati	2005	12,20	6,8	72,6	0,43	453,30
Kab. Pati	2006	13,27	6,8	72,6	0,49	567,72
Kab. Pati	2007	13,93	6,8	72,62	0,55	718,38
Kab. Pati	2008	14,57	6,8	72,72	0,60	900,22
Kab. Pati	2009	15,21	6,95	72,77	0,67	956,57
Kab. Pati	2010	15,77	6,08	72,83	0,73	989,49
Kab. Pati	2011	16,59	6,11	72,89	0,77	1.200,08
Kab. Pati	2012	17,27	6,15	72,95	0,84	1.425,84
Kab. Pati	2013	18,33	6,27	75,4	0,93	1.653,02
Kab. Pati	2014	19,06	6,35	75,43	1,01	1.862,73
Kab. Pati	2015	20,09	6,71	75,63	1,18	2.136,26
Kab. Pati	2016	21,07	6,83	75,69	1,31	2.583,07
Kab. Pati	2017	22,15	7,08	75,8	1,42	2.647,10
Kab. Pati	2018	23,29	7,18	75,93	1,59	2.781,23
Kab. Pati	2019	24,52	7,19	76,04	1,74	2.870,26
Kab. Pati	2020	23,05	7,44	76,22	1,89	2.739,72

Kab. Pati	2021	23,71	7,48	76,27	1,95	2.623,73
Kab. Pati	2022	24,87	7,79	76,32	1,97	2.717,69
Kab. Pati	2023	25,74	7,8	76,39	2,11	2.698,41
Kab. Pekalongan	2004	9,43	5,9	67,5	0,40	311,46
Kab. Pekalongan	2005	9,62	6,5	67,7	0,43	337,49
Kab. Pekalongan	2006	10,27	6,5	67,9	0,50	372,74
Kab. Pekalongan	2007	10,66	6,5	68,13	0,57	518,64
Kab. Pekalongan	2008	11,07	6,5	68,45	0,62	641,38
Kab. Pekalongan	2009	11,45	6,66	68,73	0,70	689,68
Kab. Pekalongan	2010	12,23	5,93	69,01	0,76	725,16
Kab. Pekalongan	2011	12,81	6,04	69,28	0,81	926,01
Kab. Pekalongan	2012	13,18	6,15	69,56	0,87	1.047,33
Kab. Pekalongan	2013	13,98	6,37	73,3	0,96	1.267,31
Kab. Pekalongan	2014	14,56	6,53	73,33	1,15	1.395,91
Kab. Pekalongan	2015	15,14	6,55	73,35	1,27	1.606,48
Kab. Pekalongan	2016	15,82	6,56	73,41	1,46	1.804,97
Kab. Pekalongan	2017	16,56	6,73	73,46	1,58	2.037,60
Kab. Pekalongan	2018	17,41	6,74	73,53	1,72	2.160,74
Kab. Pekalongan	2019	18,22	6,88	73,57	1,86	2.183,53
Kab. Pekalongan	2020	16,56	6,91	73,69	2,02	2.053,02
Kab. Pekalongan	2021	17,01	7,17	73,74	2,08	2.075,04
Kab. Pekalongan	2022	17,70	7,46	73,8	2,09	2.123,95
Kab. Pekalongan	2023	18,23	7,47	73,87	2,25	2.180,56
Kab. Pemalang	2004	6,47	5,6	66	0,40	417,91
Kab. Pemalang	2005	6,57	6,1	66,4	0,42	390,99
Kab. Pemalang	2006	6,96	6,1	66,8	0,53	582,96
Kab. Pemalang	2007	7,19	6,1	66,97	0,54	650,04
Kab. Pemalang	2008	7,46	6,1	67,24	0,58	767,17
Kab. Pemalang	2009	7,73	6,49	67,46	0,63	843,96
Kab. Pemalang	2010	8,94	4,94	67,68	0,68	926,83
Kab. Pemalang	2011	9,37	5,19	67,9	0,73	1.178,76

Kab. Pematang	2012	9,71	5,51	68,12	0,79	1.196,45
Kab. Pematang	2013	10,29	5,72	72,59	0,91	1.477,11
Kab. Pematang	2014	10,82	5,87	72,64	1,07	1.615,85
Kab. Pematang	2015	11,39	6,04	72,77	1,19	1.958,57
Kab. Pematang	2016	11,97	6,05	72,87	1,33	1.847,30
Kab. Pematang	2017	12,60	6,31	72,98	1,46	2.258,34
Kab. Pematang	2018	13,28	6,32	73,11	1,59	2.324,29
Kab. Pematang	2019	14,02	6,41	73,22	1,72	2.584,47
Kab. Pematang	2020	12,34	6,42	73,4	1,87	2.664,99
Kab. Pematang	2021	12,76	6,45	73,53	1,93	2.524,56
Kab. Pematang	2022	13,26	6,5	73,65	1,94	2.504,26
Kab. Pematang	2023	13,60	6,55	73,85	2,08	2.539,30
Kab. Purbalingga	2004	9,28	5,9	68,3	0,38	346,24
Kab. Purbalingga	2005	9,57	6,1	68,5	0,42	314,63
Kab. Purbalingga	2006	10,63	6,1	69,2	0,50	435,25
Kab. Purbalingga	2007	11,21	6,46	69,4	0,53	521,46
Kab. Purbalingga	2008	11,72	6,46	69,69	0,56	707,77
Kab. Purbalingga	2009	12,32	6,81	69,94	0,62	745,01
Kab. Purbalingga	2010	12,79	6,22	70,19	0,70	686,63
Kab. Purbalingga	2011	13,36	6,33	70,44	0,77	902,54
Kab. Purbalingga	2012	13,83	6,44	70,68	0,82	1.084,09
Kab. Purbalingga	2013	14,52	6,68	72,76	0,90	1.126,56
Kab. Purbalingga	2014	15,07	6,84	72,8	1,02	1.271,84
Kab. Purbalingga	2015	15,73	6,85	72,81	1,10	1.466,14
Kab. Purbalingga	2016	16,33	6,86	72,86	1,38	1.813,16
Kab. Purbalingga	2017	17,04	6,87	72,91	1,52	2.013,77
Kab. Purbalingga	2018	17,79	7	72,98	1,66	1.924,91
Kab. Purbalingga	2019	18,62	7,14	73,02	1,79	2.062,73
Kab. Purbalingga	2020	17,21	7,24	73,14	1,94	1.894,88
Kab. Purbalingga	2021	17,59	7,25	73,21	1,99	1.999,90
Kab. Purbalingga	2022	18,33	7,33	73,28	2,00	2.122,76

Kab. Purbalingga	2023	19,01	7,34	73,37	2,13	2.068,99
Kab. Purworejo	2004	8,80	6,9	68,7	0,39	353,88
Kab. Purworejo	2005	9,20	7,3	68,9	0,41	315,67
Kab. Purworejo	2006	9,61	7,3	69,5	0,46	464,78
Kab. Purworejo	2007	10,17	7,3	69,71	0,50	575,41
Kab. Purworejo	2008	10,69	7,3	70,01	0,56	773,32
Kab. Purworejo	2009	11,18	7,7	70,27	0,64	758,04
Kab. Purworejo	2010	12,24	7,39	70,52	0,72	815,86
Kab. Purworejo	2011	12,92	7,45	70,78	0,76	968,31
Kab. Purworejo	2012	13,28	7,51	71,04	0,81	1.126,13
Kab. Purworejo	2013	13,99	7,57	73,77	0,85	1.204,86
Kab. Purworejo	2014	14,57	7,63	73,83	0,91	1.445,59
Kab. Purworejo	2015	15,29	7,65	74,03	1,17	1.783,92
Kab. Purworejo	2016	16,03	7,66	74,14	1,30	1.968,16
Kab. Purworejo	2017	16,83	7,69	74,26	1,45	2.265,14
Kab. Purworejo	2018	17,68	7,7	74,4	1,57	2.125,88
Kab. Purworejo	2019	18,59	7,91	74,52	1,70	2.186,29
Kab. Purworejo	2020	17,07	8,12	74,72	1,85	2.126,67
Kab. Purworejo	2021	17,55	8,21	74,87	1,91	2.135,48
Kab. Purworejo	2022	18,38	8,32	75,03	1,91	2.347,13
Kab. Purworejo	2023	19,06	8,46	75,21	2,04	2.283,25
Kab. Rembang	2004	11,10	5,8	69	0,37	286,61
Kab. Rembang	2005	11,38	6,2	69,1	0,39	243,01
Kab. Rembang	2006	12,37	6,2	69,7	0,47	349,10
Kab. Rembang	2007	12,80	6,6	69,75	0,52	539,12
Kab. Rembang	2008	13,33	6,65	69,91	0,56	592,52
Kab. Rembang	2009	13,86	6,85	70,02	0,65	587,39
Kab. Rembang	2010	14,16	6,15	70,13	0,70	682,41
Kab. Rembang	2011	14,76	6,28	70,23	0,76	868,07
Kab. Rembang	2012	15,24	6,41	70,34	0,82	969,13
Kab. Rembang	2013	16,06	6,7	74,16	0,90	1.060,65

Kab. Rembang	2014	16,75	6,9	74,19	0,99	1.275,91
Kab. Rembang	2015	17,52	6,92	74,22	1,12	1.211,26
Kab. Rembang	2016	18,30	6,93	74,27	1,30	1.734,30
Kab. Rembang	2017	19,43	6,94	74,32	1,41	1.829,09
Kab. Rembang	2018	20,42	6,95	74,39	1,54	1.814,66
Kab. Rembang	2019	21,33	7,15	74,43	1,66	1.863,50
Kab. Rembang	2020	20,78	7,16	74,55	1,80	1.830,78
Kab. Rembang	2021	21,50	7,3	74,61	1,86	1.836,44
Kab. Rembang	2022	22,59	7,41	74,68	1,87	1.991,79
Kab. Rembang	2023	23,42	7,72	74,77	2,02	1.929,01
Kab. Semarang	2004	19,04	6,8	72	0,43	363,57
Kab. Semarang	2005	19,45	7,1	72,1	0,46	373,67
Kab. Semarang	2006	20,26	7,1	72,2	0,52	481,31
Kab. Semarang	2007	20,99	7,1	72,21	0,60	621,38
Kab. Semarang	2008	21,62	7,15	72,33	0,67	794,40
Kab. Semarang	2009	22,31	7,4	72,4	0,76	789,80
Kab. Semarang	2010	23,18	7,12	72,47	0,82	808,71
Kab. Semarang	2011	24,26	7,2	72,54	0,88	1.042,03
Kab. Semarang	2012	25,10	7,24	72,6	0,94	1.215,52
Kab. Semarang	2013	26,44	7,28	75,48	1,05	1.333,54
Kab. Semarang	2014	27,61	7,31	75,5	1,21	1.505,32
Kab. Semarang	2015	28,74	7,33	75,52	1,42	1.669,41
Kab. Semarang	2016	29,87	7,48	75,54	1,61	1.974,20
Kab. Semarang	2017	31,15	7,87	75,57	1,75	2.034,38
Kab. Semarang	2018	32,50	7,88	75,62	1,90	2.171,80
Kab. Semarang	2019	33,82	8,01	75,63	2,06	2.312,24
Kab. Semarang	2020	32,94	8,02	75,73	2,23	2.191,41
Kab. Semarang	2021	33,92	8,03	75,79	2,30	2.198,88
Kab. Semarang	2022	35,43	8,05	75,86	2,31	2.536,33
Kab. Semarang	2023	36,69	8,07	75,95	2,48	2.423,55
Kab. Sragen	2004	13,20	5,8	71,6	0,38	380,34

Kab. Sragen	2005	13,80	6,4	71,7	0,41	403,87
Kab. Sragen	2006	14,71	6,4	71,8	0,49	557,44
Kab. Sragen	2007	15,53	6,4	71,94	0,55	679,68
Kab. Sragen	2008	16,36	6,5	72,18	0,61	802,64
Kab. Sragen	2009	17,29	6,88	72,37	0,69	807,03
Kab. Sragen	2010	18,45	6,24	72,56	0,72	902,84
Kab. Sragen	2011	19,57	6,26	72,75	0,76	1.030,85
Kab. Sragen	2012	20,45	6,28	72,95	0,81	1.197,43
Kab. Sragen	2013	21,91	6,69	75,27	0,86	1.408,60
Kab. Sragen	2014	23,04	6,85	75,31	0,96	1.697,05
Kab. Sragen	2015	24,33	6,86	75,41	1,11	2.034,91
Kab. Sragen	2016	25,65	6,87	75,43	1,30	2.115,63
Kab. Sragen	2017	27,09	7,04	75,55	1,42	2.202,05
Kab. Sragen	2018	28,56	7,22	75,6	1,55	2.236,80
Kab. Sragen	2019	30,15	7,34	75,62	1,67	2.092,14
Kab. Sragen	2020	26,99	7,65	75,71	1,82	2.130,44
Kab. Sragen	2021	27,81	7,66	75,79	1,83	2.160,88
Kab. Sragen	2022	29,16	7,79	75,87	1,84	2.306,33
Kab. Sragen	2023	30,52	7,87	75,97	1,97	2.504,88
Kab. Sukoharjo	2004	15,16	7,7	69,6	0,40	328,49
Kab. Sukoharjo	2005	15,45	8,1	69,7	0,42	307,74
Kab. Sukoharjo	2006	16,64	8,1	70	0,49	423,00
Kab. Sukoharjo	2007	17,36	8,1	70,04	0,55	575,75
Kab. Sukoharjo	2008	18,05	8,15	70,11	0,64	717,12
Kab. Sukoharjo	2009	18,75	8,36	70,17	0,71	709,80
Kab. Sukoharjo	2010	19,85	7,66	70,23	0,77	780,22
Kab. Sukoharjo	2011	20,81	7,94	70,29	0,79	969,30
Kab. Sukoharjo	2012	21,61	8,09	70,36	0,84	1.196,80
Kab. Sukoharjo	2013	22,84	8,25	77,44	0,90	1.281,65
Kab. Sukoharjo	2014	23,86	8,41	77,45	1,15	1.526,64
Kab. Sukoharjo	2015	25,01	8,5	77,46	1,22	1.635,30

Kab. Sukoharjo	2016	26,22	8,58	77,46	1,40	1.879,86
Kab. Sukoharjo	2017	27,51	8,71	77,49	1,51	1.887,50
Kab. Sukoharjo	2018	28,88	8,84	77,54	1,65	2.050,16
Kab. Sukoharjo	2019	30,36	9,1	77,55	1,78	2.114,15
Kab. Sukoharjo	2020	29,33	9,34	77,65	1,94	2.073,08
Kab. Sukoharjo	2021	30,31	9,35	77,73	1,99	2.089,46
Kab. Sukoharjo	2022	31,84	9,62	77,82	2,00	2.042,03
Kab. Sukoharjo	2023	32,88	9,84	77,86	2,14	2.235,43
Kab. Tegal	2004	7,73	6	66,9	0,40	439,40
Kab. Tegal	2005	7,95	6,2	67,4	0,42	436,22
Kab. Tegal	2006	8,75	6,2	67,6	0,48	610,59
Kab. Tegal	2007	9,21	6,2	67,86	0,52	703,30
Kab. Tegal	2008	9,67	6,24	68,19	0,56	872,73
Kab. Tegal	2009	10,14	6,42	68,49	0,60	847,00
Kab. Tegal	2010	10,83	5,67	68,79	0,69	959,76
Kab. Tegal	2011	11,48	5,71	69,08	0,73	1.116,86
Kab. Tegal	2012	11,90	5,78	69,38	0,78	1.347,36
Kab. Tegal	2013	12,76	5,85	70,73	0,85	1.531,86
Kab. Tegal	2014	13,35	5,93	70,8	1,00	1.714,88
Kab. Tegal	2015	14,04	6,3	70,9	1,16	1.934,27
Kab. Tegal	2016	14,82	6,54	71,02	1,37	2.422,13
Kab. Tegal	2017	15,57	6,55	71,14	1,49	2.453,00
Kab. Tegal	2018	16,39	6,7	71,28	1,62	2.575,62
Kab. Tegal	2019	17,26	6,86	71,4	1,75	2.717,43
Kab. Tegal	2020	15,34	6,98	71,6	1,90	2.505,54
Kab. Tegal	2021	15,79	6,99	71,72	1,96	2.776,66
Kab. Tegal	2022	16,45	7,25	71,85	1,97	2.722,06
Kab. Tegal	2023	16,93	7,34	72	2,11	2.845,92
Kab. Temanggung	2004	10,96	6,4	71,9	0,38	307,17
Kab. Temanggung	2005	11,20	6,7	72	0,41	244,12
Kab. Temanggung	2006	11,95	6,7	72,1	0,46	368,84

Kab. Temanggung	2007	12,32	6,7	72,16	0,51	462,33
Kab. Temanggung	2008	12,64	6,7	72,32	0,55	611,34
Kab. Temanggung	2009	13,03	6,86	72,43	0,65	606,97
Kab. Temanggung	2010	13,70	5,99	72,54	0,71	662,15
Kab. Temanggung	2011	14,39	6,03	72,66	0,78	816,16
Kab. Temanggung	2012	14,70	6,08	72,77	0,87	956,32
Kab. Temanggung	2013	15,44	6,13	75,31	0,94	1.000,84
Kab. Temanggung	2014	16,06	6,18	75,34	1,05	1.170,88
Kab. Temanggung	2015	16,75	6,52	75,35	1,18	1.505,00
Kab. Temanggung	2016	17,43	6,55	75,39	1,31	1.739,54
Kab. Temanggung	2017	18,15	6,9	75,42	1,43	1.768,57
Kab. Temanggung	2018	18,92	6,94	75,47	1,56	1.670,31
Kab. Temanggung	2019	19,71	7,15	75,48	1,68	1.841,03
Kab. Temanggung	2020	18,84	7,24	75,58	1,83	1.783,20
Kab. Temanggung	2021	19,37	7,25	75,64	1,89	1.877,97
Kab. Temanggung	2022	20,24	7,41	75,7	1,89	1.958,75
Kab. Temanggung	2023	21,02	7,5	75,77	2,03	2.042,30
Kab. Wonogiri	2004	10,02	5,9	71,6	0,38	421,87
Kab. Wonogiri	2005	10,42	6,1	71,9	0,41	441,08
Kab. Wonogiri	2006	11,19	6,1	72	0,45	604,49
Kab. Wonogiri	2007	11,75	6,1	72,04	0,50	591,08
Kab. Wonogiri	2008	12,22	6,1	72,14	0,59	846,34
Kab. Wonogiri	2009	12,76	6,29	72,21	0,65	880,44
Kab. Wonogiri	2010	14,33	5,58	72,28	0,70	963,98
Kab. Wonogiri	2011	14,83	5,66	72,35	0,73	1.110,64
Kab. Wonogiri	2012	15,43	6,03	72,42	0,78	1.325,20
Kab. Wonogiri	2013	16,24	6,12	75,8	0,83	1.449,25
Kab. Wonogiri	2014	17,03	6,23	75,84	0,95	1.652,58
Kab. Wonogiri	2015	17,89	6,39	75,86	1,10	1.877,83
Kab. Wonogiri	2016	18,77	6,57	75,88	1,29	2.132,91
Kab. Wonogiri	2017	19,71	6,68	76	1,40	2.315,60

Kab. Wonogiri	2018	20,73	6,88	76,05	1,54	2.246,86
Kab. Wonogiri	2019	21,74	7,04	76,07	1,66	2.455,98
Kab. Wonogiri	2020	19,71	7,33	76,16	1,80	2.262,81
Kab. Wonogiri	2021	20,25	7,34	76,28	1,83	2.297,51
Kab. Wonogiri	2022	21,24	7,42	76,41	1,84	2.243,21
Kab. Wonogiri	2023	22,42	7,67	76,56	1,97	2.475,19
Kab. Wonosobo	2004	9,43	5,6	68,7	0,38	351,62
Kab. Wonosobo	2005	9,60	6	68,9	0,42	348,32
Kab. Wonosobo	2006	10,28	6	69	0,46	427,27
Kab. Wonosobo	2007	10,61	6,11	69,2	0,51	512,42
Kab. Wonosobo	2008	10,96	6,11	69,49	0,57	616,37
Kab. Wonosobo	2009	11,35	6,27	69,74	0,67	692,36
Kab. Wonosobo	2010	11,93	5,81	69,98	0,72	674,39
Kab. Wonosobo	2011	12,50	5,87	70,23	0,78	888,44
Kab. Wonosobo	2012	12,88	5,9	70,48	0,83	986,54
Kab. Wonosobo	2013	13,43	5,92	70,76	0,88	988,10
Kab. Wonosobo	2014	14,00	6,07	70,82	0,99	1.220,32
Kab. Wonosobo	2015	14,58	6,11	71,02	1,17	1.494,45
Kab. Wonosobo	2016	15,29	6,12	71,16	1,33	1.619,14
Kab. Wonosobo	2017	15,86	6,51	71,3	1,46	1.715,29
Kab. Wonosobo	2018	16,59	6,75	71,46	1,59	1.856,17
Kab. Wonosobo	2019	17,45	6,76	71,6	1,71	2.024,79
Kab. Wonosobo	2020	15,43	6,81	71,82	1,86	1.881,32
Kab. Wonosobo	2021	15,86	6,82	71,94	1,92	1.860,10
Kab. Wonosobo	2022	16,48	6,88	72,05	1,93	2.011,11
Kab. Wonosobo	2023	16,94	6,89	72,17	2,08	2.105,99
Kota Magelang	2004	24,64	9,8	69,6	0,39	175,41
Kota Magelang	2005	24,30	10	69,7	0,41	172,10
Kota Magelang	2006	25,04	10	70	0,49	235,81
Kota Magelang	2007	25,90	10	70,01	0,52	317,03
Kota Magelang	2008	26,71	10	70,11	0,57	386,12

Kota Magelang	2009	27,58	10,1	70,17	0,67	412,72
Kota Magelang	2010	33,92	10,08	70,22	0,75	410,62
Kota Magelang	2011	35,88	10,14	70,28	0,80	469,41
Kota Magelang	2012	37,23	10,2	70,34	0,84	536,35
Kota Magelang	2013	39,65	10,22	76,54	0,90	630,85
Kota Magelang	2014	41,47	10,27	76,57	1,04	682,22
Kota Magelang	2015	43,44	10,28	76,58	1,21	736,34
Kota Magelang	2016	45,59	10,29	76,62	1,34	871,86
Kota Magelang	2017	47,92	10,3	76,66	1,45	879,41
Kota Magelang	2018	50,37	10,31	76,72	1,58	937,35
Kota Magelang	2019	12,45	10,33	76,75	1,71	995,16
Kota Magelang	2020	51,94	10,39	76,85	1,85	798,35
Kota Magelang	2021	53,56	10,62	76,93	1,91	935,05
Kota Magelang	2022	56,62	10,94	77,02	1,94	1.039,50
Kota Magelang	2023	59,48	11,2	77,22	2,07	1.019,72
Kota. Pekalongan	2004	13,27	8,2	68,9	0,40	180,29
Kota. Pekalongan	2005	13,27	8,3	69,1	0,43	179,45
Kota. Pekalongan	2006	14,29	8,3	69,7	0,50	277,78
Kota. Pekalongan	2007	14,75	8,52	69,8	0,56	314,88
Kota. Pekalongan	2008	15,20	8,52	70,01	0,62	397,14
Kota. Pekalongan	2009	15,82	8,66	70,16	0,71	384,21
Kota. Pekalongan	2010	16,43	7,6	70,32	0,76	408,56
Kota. Pekalongan	2011	17,15	7,72	70,48	0,81	505,92
Kota. Pekalongan	2012	17,74	7,8	70,63	0,90	561,67
Kota. Pekalongan	2013	18,76	7,96	74,06	0,98	664,18
Kota. Pekalongan	2014	19,60	8,12	74,09	1,17	736,79
Kota. Pekalongan	2015	20,39	8,28	74,11	1,29	792,54
Kota. Pekalongan	2016	21,28	8,29	74,15	1,50	869,32
Kota. Pekalongan	2017	22,22	8,56	74,19	1,62	924,17
Kota. Pekalongan	2018	23,28	8,57	74,25	1,77	883,18
Kota. Pekalongan	2019	24,35	8,71	74,28	1,91	954,40

Kota. Pekalongan	2020	23,89	8,96	74,38	2,07	944,84
Kota. Pekalongan	2021	24,66	9,18	74,44	2,14	962,09
Kota. Pekalongan	2022	25,96	9,2	74,51	2,16	1.031,09
Kota. Pekalongan	2023	26,70	9,29	74,6	2,31	1.031,85
Kota. Salatiga	2004	26,90	9,2	70,2	0,41	168,95
Kota. Salatiga	2005	26,27	9,5	70,3	0,43	172,23
Kota. Salatiga	2006	28,12	9,5	70,6	0,50	225,67
Kota. Salatiga	2007	29,05	9,5	70,66	0,58	253,68
Kota. Salatiga	2008	29,86	9,5	70,82	0,66	368,39
Kota. Salatiga	2009	30,55	9,75	70,92	0,75	432,66
Kota. Salatiga	2010	34,32	8,86	71,03	0,80	418,62
Kota. Salatiga	2011	36,00	8,97	71,14	0,84	458,62
Kota. Salatiga	2012	37,05	9,09	71,25	0,90	551,63
Kota. Salatiga	2013	39,13	9,2	76,53	0,97	529,24
Kota. Salatiga	2014	40,72	9,37	76,53	1,17	645,79
Kota. Salatiga	2015	42,21	9,81	76,83	1,29	673,87
Kota. Salatiga	2016	43,82	9,82	76,87	1,45	919,67
Kota. Salatiga	2017	45,65	10,15	76,98	1,60	849,47
Kota. Salatiga	2018	47,65	10,4	77,11	1,74	923,54
Kota. Salatiga	2019	49,81	10,41	77,22	1,88	942,69
Kota. Salatiga	2020	49,42	10,42	77,4	2,03	944,95
Kota. Salatiga	2021	50,75	10,66	77,55	2,10	956,50
Kota. Salatiga	2022	53,14	10,95	77,72	2,13	932,07
Kota. Salatiga	2023	54,89	11,24	77,93	2,28	1.014,78
Kota. Semarang	2004	41,44	9,4	71,7	0,44	661,42
Kota. Semarang	2005	42,67	9,8	71,8	0,47	712,55
Kota. Semarang	2006	44,11	9,8	71,9	0,59	926,05
Kota. Semarang	2007	46,10	9,8	71,9	0,65	1.116,90
Kota. Semarang	2008	47,95	9,8	72,01	0,72	1.325,30
Kota. Semarang	2009	49,78	9,98	72,07	0,84	1.505,50
Kota. Semarang	2010	51,94	9,61	72,13	0,94	1.732,66

Kota. Semarang	2011	54,33	9,8	72,18	0,96	2.036,58
Kota. Semarang	2012	56,00	9,92	72,24	0,99	2.053,33
Kota. Semarang	2013	58,96	10,06	77,18	1,21	2.473,49
Kota. Semarang	2014	61,63	10,19	77,18	1,44	2.957,18
Kota. Semarang	2015	64,14	10,2	77,2	1,69	3.200,86
Kota. Semarang	2016	66,82	10,49	77,21	1,91	3.931,80
Kota. Semarang	2017	70,14	10,5	77,21	2,13	4.328,94
Kota. Semarang	2018	73,49	10,51	77,23	2,31	4.506,41
Kota. Semarang	2019	77,28	10,52	77,25	2,50	4.633,93
Kota. Semarang	2020	83,22	10,53	77,34	2,72	4.128,91
Kota. Semarang	2021	87,35	10,78	77,51	2,81	4.764,05
Kota. Semarang	2022	92,17	10,8	77,69	2,84	4.871,95
Kota. Semarang	2023	95,50	10,81	77,9	3,06	5.340,47
Kota. Surakarta	2004	30,55	9,7	71,6	0,41	328,31
Kota. Surakarta	2005	30,36	10	71,7	0,43	340,10
Kota. Surakarta	2006	33,36	10	71,8	0,51	470,56
Kota. Surakarta	2007	34,98	10	71,84	0,59	588,30
Kota. Surakarta	2008	36,59	10,15	71,98	0,67	760,08
Kota. Surakarta	2009	38,37	10,32	72,07	0,72	747,27
Kota. Surakarta	2010	43,00	9,99	72,16	0,79	825,86
Kota. Surakarta	2011	45,55	10,05	72,25	0,83	982,65
Kota. Surakarta	2012	47,34	10,11	72,35	0,86	1.145,17
Kota. Surakarta	2013	50,47	10,25	76,97	0,92	1.375,30
Kota. Surakarta	2014	52,90	10,33	76,99	1,15	1.479,83
Kota. Surakarta	2015	55,55	10,36	77	1,22	1.532,53
Kota. Surakarta	2016	58,30	10,37	77,03	1,42	1.680,46
Kota. Surakarta	2017	61,39	10,38	77,06	1,53	1.768,35
Kota. Surakarta	2018	64,70	10,53	77,11	1,67	1.914,82
Kota. Surakarta	2019	68,55	10,54	77,12	1,80	2.012,41
Kota. Surakarta	2020	66,65	10,69	77,22	1,96	1.639,67
Kota. Surakarta	2021	69,27	10,9	77,32	2,01	1.866,50

Kota. Surakarta	2022	73,57	10,92	77,43	2,04	2.088,32
Kota. Surakarta	2023	77,10	11	77,63	2,17	2.107,37
Kota. Tegal	2004	21,37	7,8	67,7	0,40	252,06
Kota. Tegal	2005	21,62	7,8	67,9	0,42	247,59
Kota. Tegal	2006	23,74	7,8	68	0,48	291,81
Kota. Tegal	2007	24,89	8,06	68,14	0,52	333,58
Kota. Tegal	2008	26,10	8,06	68,37	0,56	393,20
Kota. Tegal	2009	27,34	8,25	68,56	0,61	458,62
Kota. Tegal	2010	28,78	7,46	68,74	0,70	474,36
Kota. Tegal	2011	30,49	7,66	68,93	0,74	572,01
Kota. Tegal	2012	31,27	7,85	69,12	0,80	586,69
Kota. Tegal	2013	33,15	8,05	74,06	0,86	673,04
Kota. Tegal	2014	34,66	8,26	74,1	1,04	783,10
Kota. Tegal	2015	36,38	8,27	74,12	1,21	959,42
Kota. Tegal	2016	38,21	8,28	74,18	1,39	1.074,74
Kota. Tegal	2017	40,34	8,29	74,23	1,50	1.017,22
Kota. Tegal	2018	42,55	8,3	74,3	1,63	916,73
Kota. Tegal	2019	44,84	8,31	74,34	1,76	1.046,58
Kota. Tegal	2020	39,99	8,51	74,46	1,93	1.048,61
Kota. Tegal	2021	40,94	8,73	74,54	1,98	1.089,71
Kota. Tegal	2022	42,66	9	74,64	2,01	1.127,74
Kota. Tegal	2023	44,09	9,24	74,77	2,15	1.075,12

Lampiran II Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	449.996917	(34,661)	0.0000
Cross-section Chi-square	2228.900182	34	0.0000

Lampiran III Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	38.152196	4	0.0000

Lampiran IV Hasil Uji Random Effect Model

Dependent Variable: LOG(PDRB_PERKAPITA)

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 06/01/25 Time: 20:52

Sample: 2004 2023

Periods included: 20

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 700

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.308991	0.830399	-0.372100	0.7099
LOG(RLS)	0.139765	0.074330	1.880321	0.0605
LOG(AHH)	0.473835	0.190883	2.482335	0.0133
LOG(UMK)	0.222037	0.026829	8.275893	0.0000
LOG(PP)	0.136888	0.020615	6.640308	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.345397	0.9551
Idiosyncratic random		0.074920	0.0449

Weighted Statistics			
R-squared	0.899149	Mean dependent var	0.143759
Adjusted R-squared	0.898568	S.D. dependent var	0.240952
S.E. of regression	0.076739	Sum squared resid	4.092788
F-statistic	1549.085	Durbin-Watson stat	1.256723
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.240667	Mean dependent var	2.967407
Sum squared resid	163.9698	Durbin-Watson stat	0.031369

Lampiran V Hasil Uji Common Effect Model

Dependent Variable: LOG(PDRB_PERKAPITA)

Method: Panel Least Squares

Date: 06/01/25 Time: 20:51

Sample: 2004 2023

Periods included: 20

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 700

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.521688	2.433164	-2.680333	0.0075
LOG(RLS)	2.211423	0.108704	20.34354	0.0000
LOG(AHH)	0.945175	0.591793	1.597138	0.1107
LOG(UMK)	0.019463	0.060865	0.319767	0.7492
LOG(PP)	0.148631	0.043669	3.403563	0.0007
R-squared	0.585116	Mean dependent var	2.967407	
Adjusted R-squared	0.582728	S.D. dependent var	0.555811	
S.E. of regression	0.359035	Akaike info criterion	0.796323	
Sum squared resid	89.58976	Schwarz criterion	0.828831	
Log likelihood	-273.7132	Hannan-Quinn criter.	0.808890	
F-statistic	245.0417	Durbin-Watson stat	0.103783	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran VI Hasil Uji Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(PDRB PERKAPITA)

Method: Panel Least Squares

Date: 06/01/25 Time: 20:52

Sample: 2004 2023

Periods included: 20

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 700

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.076959	0.832253	0.092471	0.9264
LOG(RLS)	0.064123	0.075492	0.849406	0.3960
LOG(AHH)	0.422594	0.191395	2.207971	0.0276
LOG(UMK)	0.234104	0.027015	8.665651	0.0000
LOG(PP)	0.134570	0.020719	6.495052	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.982818	Mean dependent var	2.967407
Adjusted R-squared	0.981830	S.D. dependent var	0.555811
S.E. of regression	0.074920	Akaike info criterion	-2.290677
Sum squared resid	3.710245	Schwarz criterion	-2.037117
Log likelihood	840.7369	Hannan-Quinn criter.	-2.192661
F-statistic	994.9931	Durbin-Watson stat	1.379542
Prob(F-statistic)	0.000000		